

Capaian 10 Tahun Pemerintahan Joko Widodo

Kantor Staf Presiden RI



Capaian 10 Tahun Pemerintahan Joko Widodo

Kantor Staf Presiden RI



Möbius Strip

Möbius strip adalah sebuah bentuk geometris unik yang hanya memiliki satu permukaan dan satu tepi. Simbol ini sering digunakan sebagai simbol dari sesuatu yang tidak berujung atau berkelanjutan. Dalam konteks warisan seorang presiden, Möbius strip ini jadi simbol yang cocok untuk menggambarkan bagaimana pengaruh dan keputusan seorang pemimpin tidak berhenti begitu saja ketika masa jabatannya selesai, tapi terus terasa dan memengaruhi kehidupan rakyat di masa depan.

Pada Möbius strip ini digambarkan berbagai pencapaian dan kebijakan yang pernah dijalankan oleh presiden tersebut. Mulai dari pembangunan infrastruktur yang kuat, kebijakan yang memihak rakyat, sampai hubungan diplomatik yang mengharumkan nama bangsa. Semua ini ditampilkan untuk menunjukkan bahwa apa yang

dilakukan oleh presiden ini tidak hanya untuk masa jabatannya saja, tapi juga untuk masa depan negara.

Tema ini juga mengajak kita untuk melihat bagaimana masa lalu dan masa depan saling berhubungan. Möbius strip ini digambarkan sebagai jembatan yang menghubungkan keduanya, memperlihatkan bahwa apa yang diwariskan oleh seorang presiden bisa menjadi landasan untuk generasi berikutnya. Anak-anak yang penuh harapan, kemajuan teknologi, dan segala potensi masa depan turut ditampilkan, menunjukkan bahwa warisan ini masih terus hidup dan relevan, siap membimbing arah bangsa ke depan.

Pencahayaan dan warna dalam tema ini juga dibuat dinamis, dengan kontras antara terang

dan gelap yang menonjolkan bahwa warisan ini bukan cuma tentang satu masa, tapi tentang keseluruhan perjalanan bangsa dari masa lalu ke masa depan. Tekstur garis-garis yang digunakan juga menggambarkan perubahan dan perkembangan, seolah menunjukkan bahwa meski masa kepemimpinan presiden ini sudah berlalu, dampaknya masih terasa jelas di setiap sudut kehidupan kita.

Secara keseluruhan, warisan presiden ini, seperti Möbius strip itu sendiri, terus berputar dan memberi dampak, membuat kita sadar bahwa kepemimpinan sejati adalah yang meninggalkan jejak panjang dan abadi bagi generasi mendatang.

Daftar Isi

Prolog		
	Mobius Strip	i
	Daftar Isi	iii
	Pendahuluan	vi
<hr/>		
Gas-Rem dan Resiliensi: Kombinasi Selamatkan Indonesia	Halaman	1
<hr/>		
Sejahtera yang Mulai Terwujud	Halaman	7
<hr/>		
Infrastruktur Tulang Punggung Kemakmuran	Halaman	11
<hr/>		
Unjuk Gigi Hilirisasi	Halaman	19
<hr/>		
Transformasi Digital	Halaman	23

To Respect and To Protect Human Rights	Halaman	27
<hr/>		
Papua adalah Tanah Damai	Halaman	29
<hr/>		
Menjaga Semangat Desa Tetap Berpijar	Halaman	35
<hr/>		
Diplomasi yang Menyala	Halaman	37
<hr/>		
Ibukota Kita Nusantara	Halaman	43
<hr/>		
Mitigasi Perubahan Iklim	Halaman	45



Pendahuluan

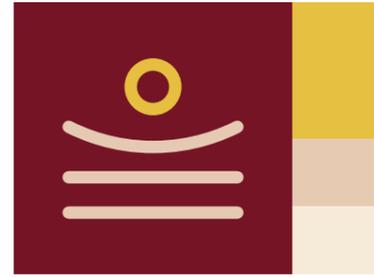
Sepuluh tahun lalu, Joko Widodo datang dengan kacamata Indonesiasentris dalam membangun bangsa. Yang dilakukan bukan hanya untuk pemerataan pembangunan di seluruh penjuru nusantara, tapi juga membawa pengaruh Indonesia di pergaulan dunia.

Dua masa kepemimpinan dengan dua Wakil Presiden, Presiden Jokowi bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di atas lima persen sekaligus menggandakan nilai Produk Domestik Bruto. Menjadi negara menengah-atas dan masuk dalam 20 negara dengan perekonomian terbesar dunia, adalah ganjaran yang diterima. Sekalipun pernah mengalami guncangan karena COVID19, Presiden Jokowi mampu menjaga agar negara ini tidak terperosok terlalu dalam.

Peletakan fondasi menjadi Indonesia Maju digarap di setiap lini, dari Sabang sampai Merauke, mulai dari masifnya infrastruktur, transformasi digital, hilirisasi, pembangunan Papua, hingga menyiapkan kota masa depan: Ibu Kota Nusantara. Semua ini digarap tanpa mengabaikan dinamika geopolitik di kawasan maupun di internasional. Cengkeraman pengaruh Indonesia diinjeksikan agar dunia dibangun dengan kedamaian dan kesetaraan agar negara-negara berkembang bisa mendapatkan tempat dalam percaturan global.

Tidak ada pemimpin yang tidak meninggalkan warisan bagi penerusnya. Demikian pula perjalanan sepuluh tahun terakhir ini, masih ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diteruskan, di samping mempertahankan apa yang sudah berjalan. Semua ini semata-mata agar masyarakat tetap bisa mendapatkan manfaat dan merasakan kenikmatan menjadi warga negara Indonesia.



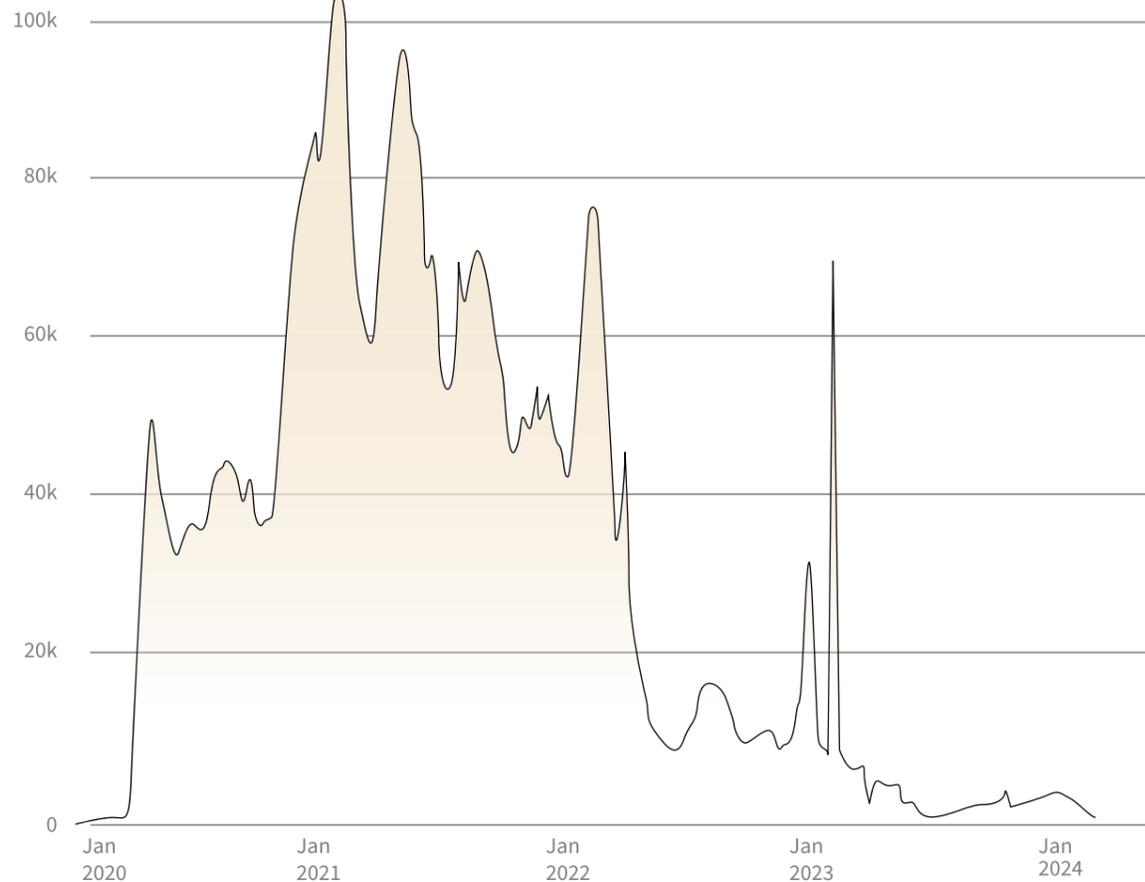


Gas-Rem dan Resiliensi: Kombinasi Selamatkan Indonesia

Indonesia menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola pandemi COVID-19. Bukan hanya angka kematian per kapita yang rendah, tapi juga didukung kebijakan fiskal yang tepat.

Keberhasilan melewati masa sulit ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara yang berhasil menangani krisis global akibat COVID-19 dengan cepat.

Total Kematian Global COVID-19



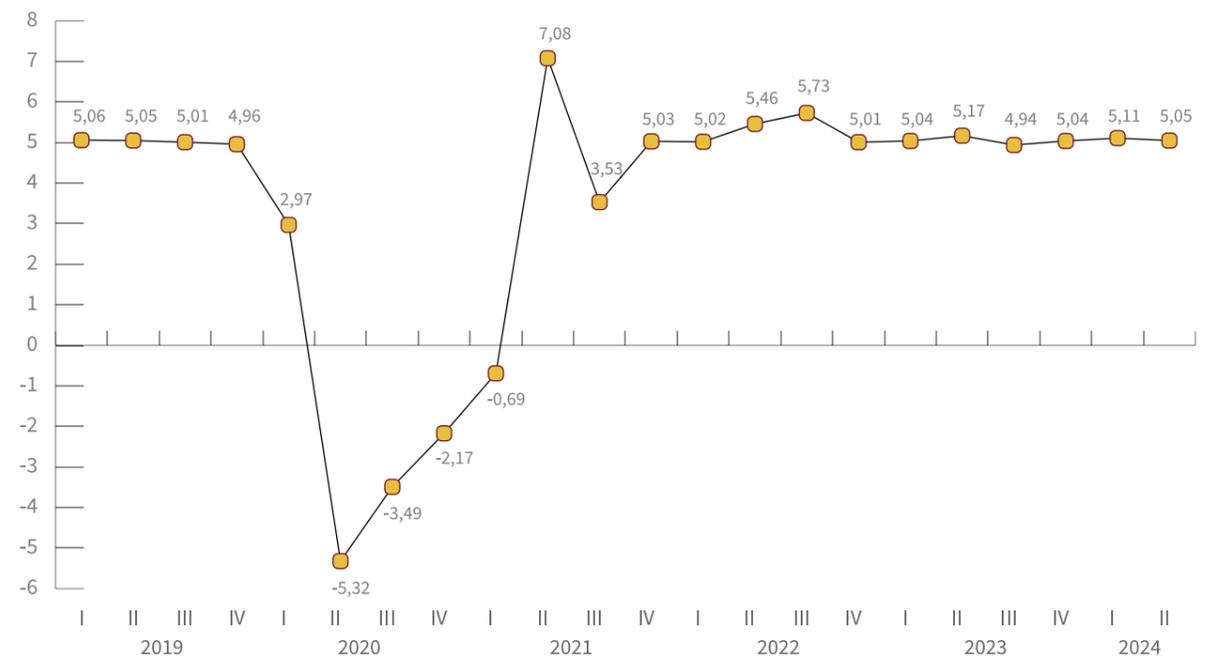
Sumber: Kementerian Kesehatan, 2024



Sumber Foto: Antara

Grafis Pertumbuhan Ekonomi 2020-2023

Dalam satuan (%)

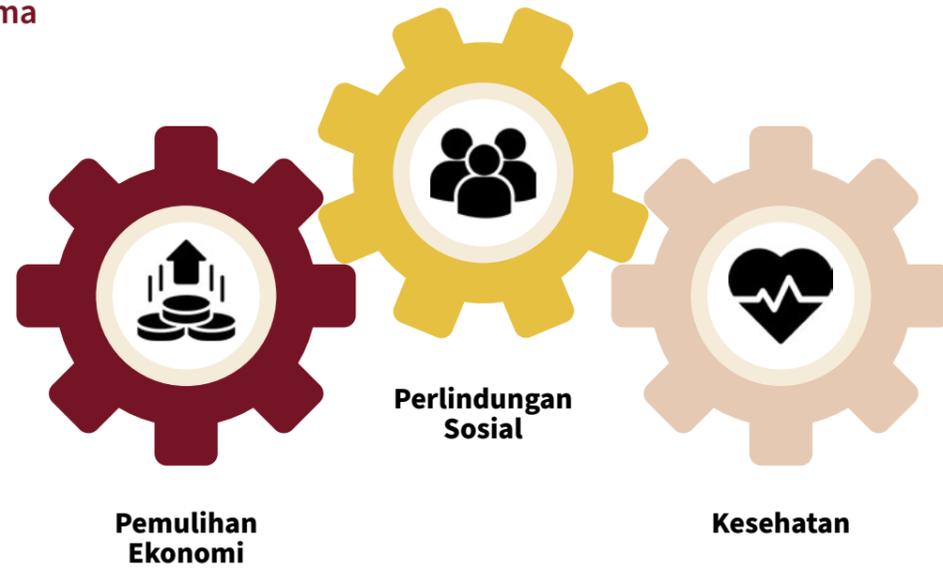


Sumber: BPS, 2024

Presiden Jokowi, saat itu, menerapkan pendekatan 'Gas dan Rem' untuk membajak krisis. Keseimbangan antara penanganan kesehatan dan stabilitas ekonomi diupayakan, sehingga sekali waktu pembatasan ketat dilakukan namun juga diselingi pelonggaran bagi aktivitas masyarakat. Ada 3 roda penting dalam

mengoperasikan 'Gas dan Rem'. Pertama, stimulus ekonomi yang menjamin masyarakat tidak kehilangan pekerjaan. Kedua, perlindungan sosial agar masyarakat tidak kelaparan. Dan ketiga, penanganan kesehatan untuk meminimalisir korban.

3 Kunci Utama Gas & Rem

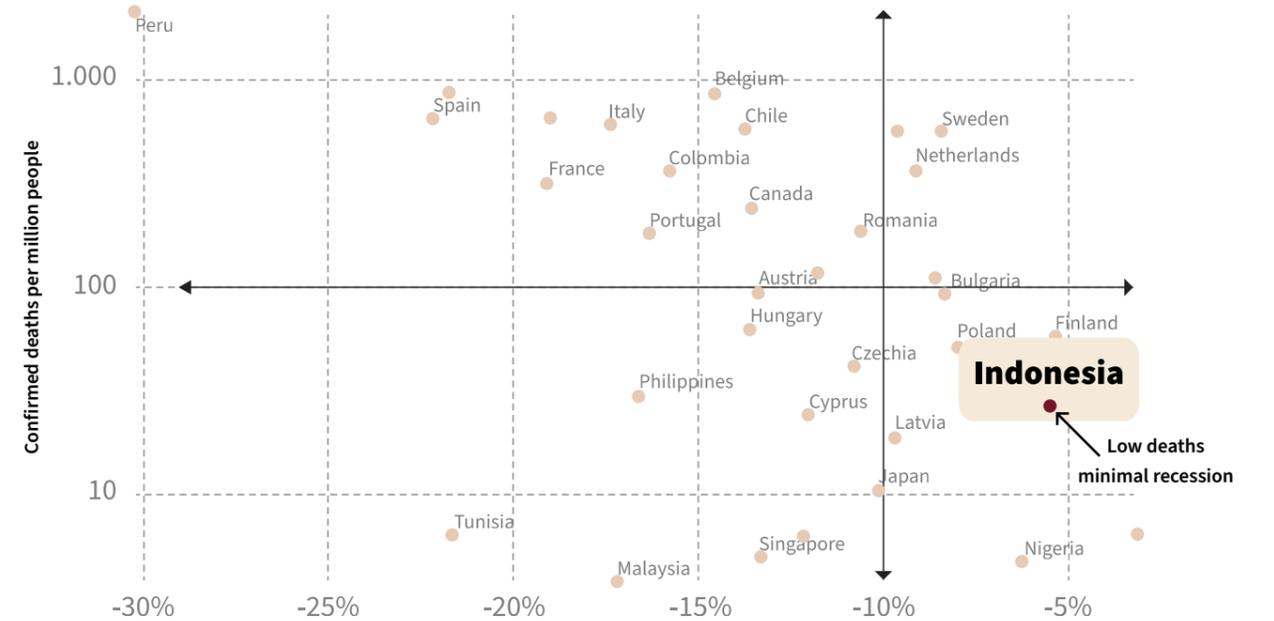


Riset yang dirilis pada tahun 2024 oleh WHO menunjukkan Indonesia berada dalam kondisi minim tingkat kematian dan resesi yang rendah. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kekuatan masyarakat itu sendiri. Resiliensi masyarakat

dan tenaga kesehatan yang kuat, serta budaya gotong-royong, memainkan peran penting dalam menghadapi pandemi yang tidak bisa diprediksi. Menyelamatkan Indonesia.

Tingkat Kematian Akibat COVID19 Minim dan Resesi yang Rendah

Data per 30 August 2024



Sumber: WHO, 2024



Sumber Foto: Antara

Pilar Transformasi Kesehatan	Before	After
1. Transformasi Layanan Primer	Kurangnya akses dalam mendapatkan layanan primer dan belum optimalnya penemuan kasus penyakit sejak dini	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan 165 Puskesmas sesuai standar > > 156 Pusk di Prop. Papua • Penggalangan komitmen Pemda untuk mengisi formasi ASN bidang Kesehatan tahun 2024 sesuai kebutuhan prioritas • Program Integrasi Layanan Primer (ILP) dari Tingkat Puskesmas sampai Posyandu
2. Transformasi Layanan Rujukan	Kurangnya Kapasitas Layanan Rujukan di Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> • Pengampuan jejaring layanan KJSU • Proctorship, mis: Pengembangan kapasitas intervensi kardiovaskuler ke RS Tulungagung, pendampingan RS Adam Malik unt transplantasi ginjal, dan RSUD Soekarno di Prop.Babel • Pemberian Bantuan Alat Kesehatan ke RS • Kerjasama internasional dalam pembangunan RS dan knowledge sharing, mis : RSJPN dengan Tokushukai Medical Group dan RS Ngoerah dengan Sun Medical Center Korsel
3. Transformasi Sistem Kesehatan	Ketahanan kesehatan yang mash lemah (pelajaran berharga pasca Pandemi COVID-19)	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri • Investasi peningkatan industri, kerja sama, dan dukungan regulasi di bidang inovasi teknologi kesehatan
4. Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan	Tingginya beban pembiayaan kesehatan untuk pengobatan/ kuratif	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian inflasi di sektor kesehatan dan memastikan akses layanan kesehatan berkualitas tanpa terbebani oleh biaya yang tinggi pembiayaan skiring kesehatan di Puskesmas

Pilar Transformasi Kesehatan	Before	After
		<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan RIBK guna memastikan momentum dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2029 s/d tahun 2045
5. Transformasi SDM Kesehatan	Kekurangan dokter spesialis terjadi hampir di seluruh provinsi dan dibutuhkan waktu lama untuk memenuhi kekurangan tersebut	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemerataan SDM Kesehatan • Program Produksi SDM Kesehatan • Program Kemudahan Layanan • Program Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
6. Transformasi Teknologi Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Fragmentasi Data dan Sistem Informasi Kesehatan • Perkembangan pengetahuan internasional untuk pengobatan yang presisi untuk pembiayaan kesehatan lebih baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi Sistem Data Kesehatan berbasis individu • Pengembangan teknologi bidang kesehatan melalui Biomedical Genome Based Science Initiative

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2024

Belajar dari gegap-gempita penanganan pandemi, muncul kebutuhan untuk membenahi sistem kesehatan di tanah air. Agar di kemudian hari, kita tidak lagi kebingungan menghadapi gempuran

pandemi. Enam transformasi kesehatan ditetapkan untuk menciptakan sistem kesehatan yang tangguh. Dan saat ini, proses transformasi sedang berjalan untuk diteruskan.

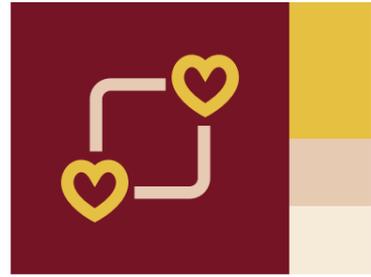
“

Gotong royong virtual merupakan genre baru. Model ini memaksa kita untuk membantu siapapun tanpa mengenal in person. Pola pikirnya 'yang penting saya membantu' entah siapapun yang menerima bantuannya. Menunggu bukan opsi, masyarakat harus aktif mengajak semua pihak bekerja sama.

”

Rimawan Pradiptyo
Founder Sambatan Jogja (SONJO)

Sumber: Kagama.co



Sejahtera yang Mulai Terwujud

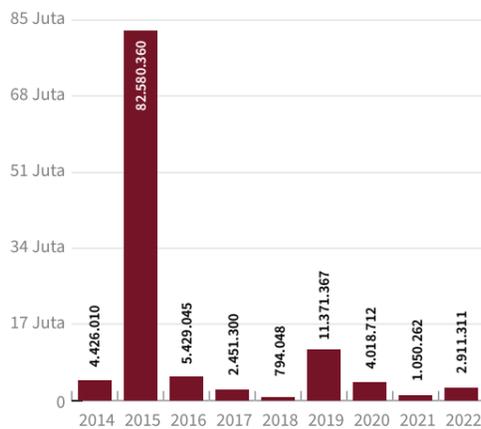
Memberikan kesejahteraan bagi rakyat bukanlah ide baru. Setiap pemimpin negeri ini selalu berupaya memberikan perlindungan sosial bagi siapa saja, tidak terkecuali Presiden Jokowi. Satu dasawarsa ini, pemerintah berhasil mengoptimalkan program yang telah berjalan, sekaligus menciptakan langkah-langkah baru yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan dan layanan kesehatan. Sehingga tidak ada lagi yang khawatir jatuh miskin karena menyekolahkan anak-anaknya atau takut berobat karena tidak punya uang.

Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat menjadi kunci terbukanya akses bagi si miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya. Lebih dari 267 juta jiwa menjadi peserta JKN-KIS, yang artinya negara menjamin perawatan kesehatan sampai sembuh bagi 95% penduduk Indonesia. Demikian pula dengan sektor pendidikan. Kartu Indonesia Pintar awalnya mencakup pendidikan 12 tahun, namun lima tahun terakhir dikembangkan menjadi KIP Kuliah yang menjamin pendidikan tinggi bagi hampir 1 juta mahasiswa di 2024.

Data Distribusi KIS

Data 2014 - 2022

115.032.415 Jiwa

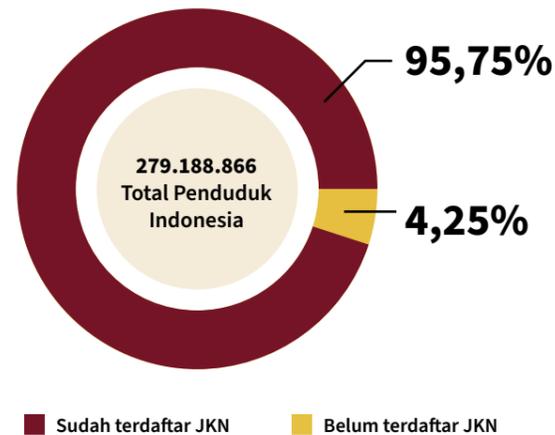


Sumber: BPJS Kesehatan, 2023

Cakupan Kepesertaan JKN

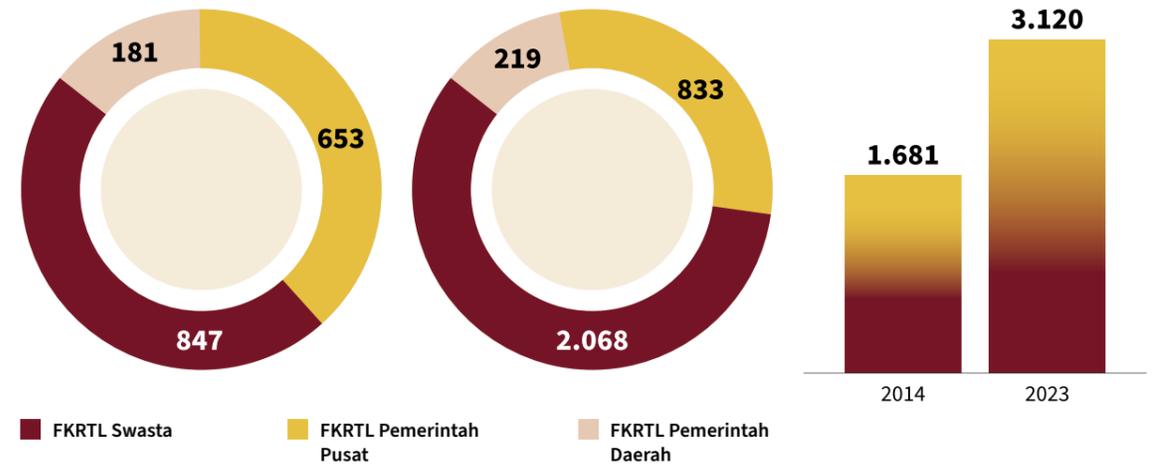
Data per 31 Desember 2023

267.311.566 Jiwa



Kerjasama dengan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)

Data per Tahun 2023



Sumber: BPJS Kesehatan, 2023

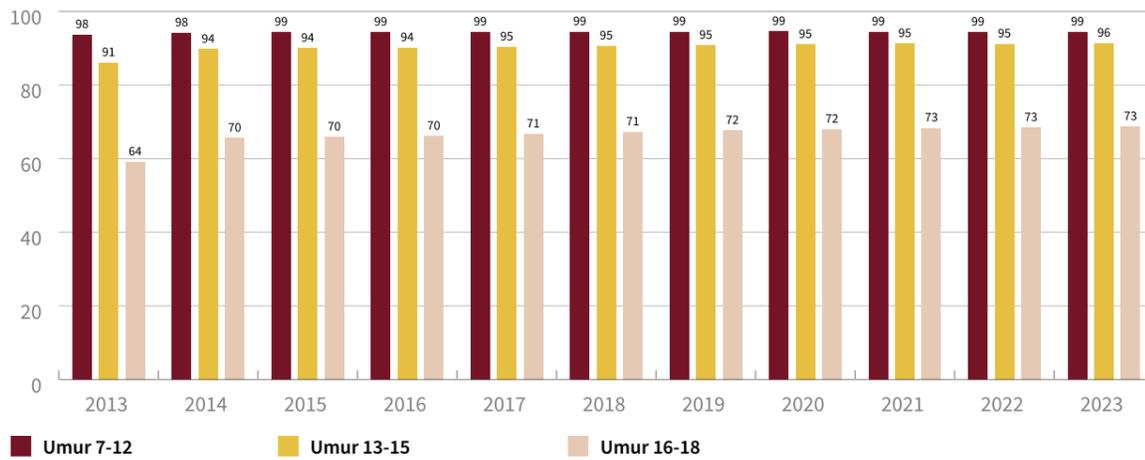
Kehadiran BPJS Kesehatan dan Program JKN mendorong geliat pertumbuhan industri kesehatan swasta, khususnya rumah sakit. Akses Kesehatan semakin luas.



Sumber Foto: Antara

Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia 2013-2023

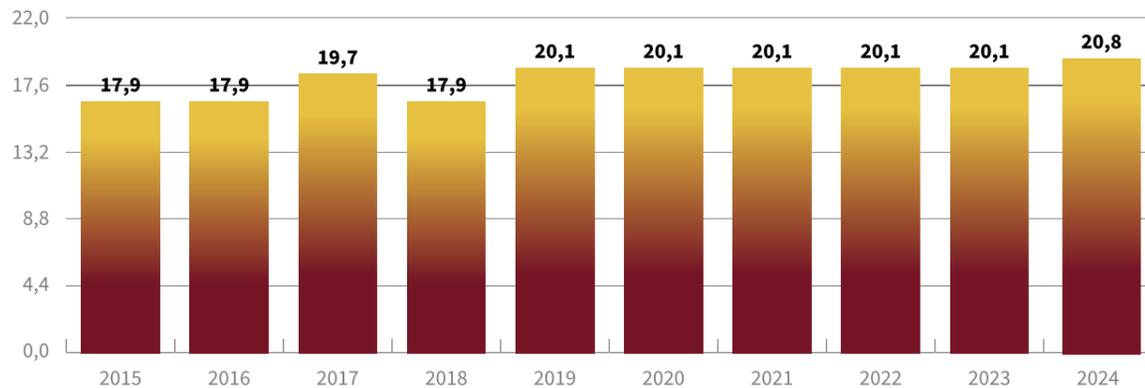
Dalam satuan (%)



Sumber: BPS, 2023

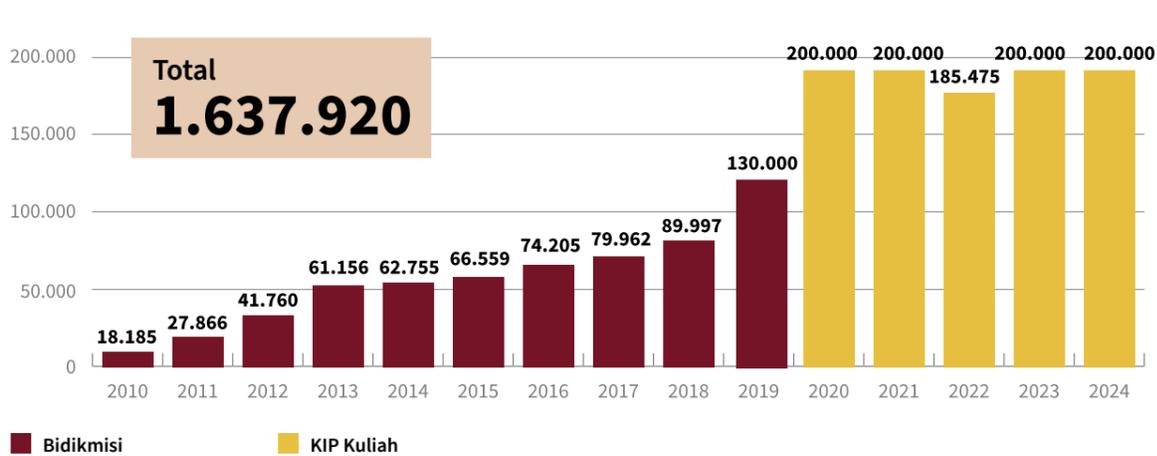
Target Program Indonesia Pintar

Dalam satuan (juta orang)



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama, 2024

Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Bidikmisi dan KIP Kuliah



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024

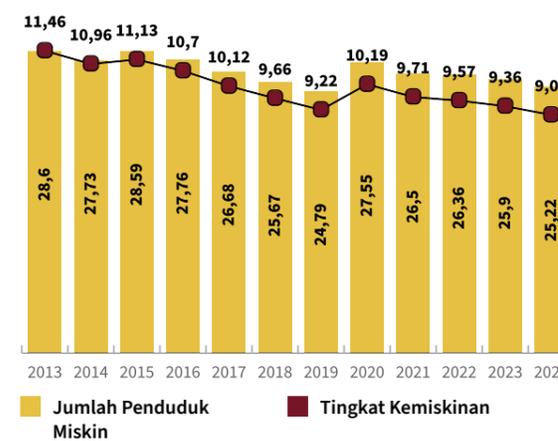
Lebih dari itu, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Pra Kerja, dan subsidi sejumlah kebutuhan pokok telah membantu meringankan beban ekonomi keluarga, memberikan mereka kesempatan untuk hidup lebih sejahtera dan mandiri. Semua ini membuktikan 'kesejahteraan sosial' telah menjadi lebih dari sekadar impian—ia menjadi

kenyataan yang dirasakan oleh banyak orang di seluruh negeri.

Tidak lagi takut terjerumus dalam kesengsaraan dan bahkan bisa keluar dari jurang kemiskinan adalah harapan yang harus terus dijaga oleh siapapun pemimpin negeri ini.

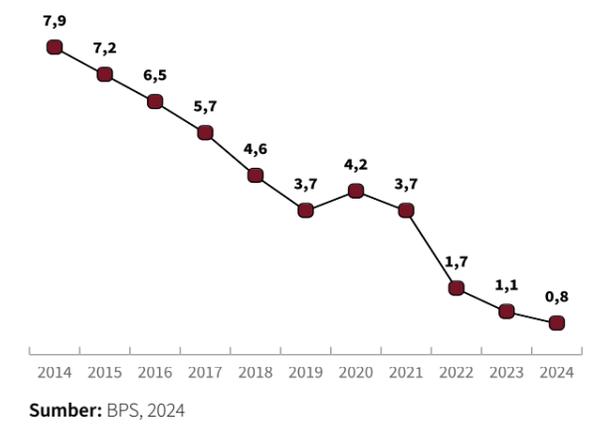
Tingkat Kemiskinan

Dalam satuan (%)



Tingkat Kemiskinan Ekstrem

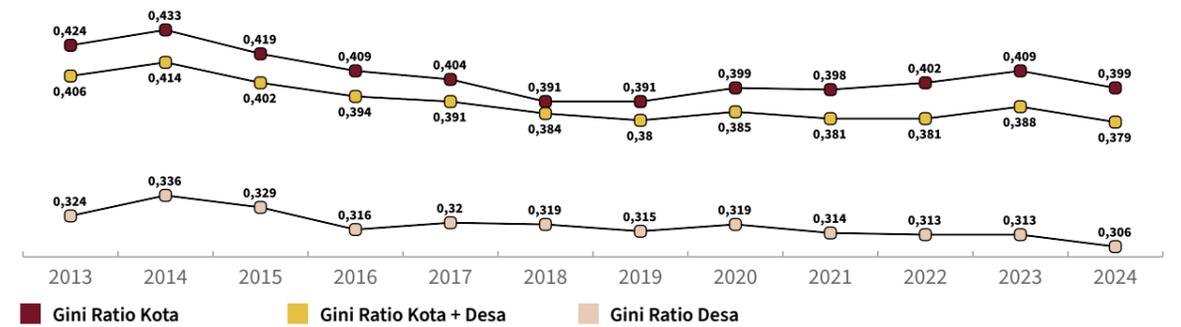
Dalam satuan (%)



Sumber: BPS, 2024

Gini Ratio

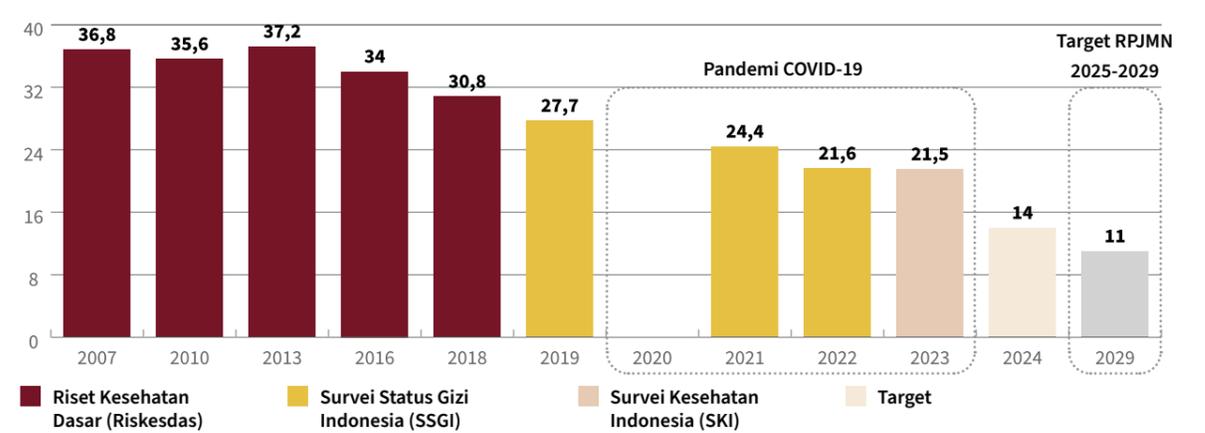
Dalam satuan (poin)



Sumber: BPS, 2024

Prevalensi Stunting Indonesia

Dalam satuan (%)



Sumber: BPS, 2024



Infrastruktur Tulang Punggung Kemakmuran

“Beton tidak bisa dimakan,” kata sebagian orang. Benar, beton tidak bisa dimakan. Tapi beton bisa mendatangkan kemakmuran bagi siapa saja yang mau berusaha. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata menjadi kendala pertama yang harus diatasi

ketika muncul ketimpangan di berbagai daerah. Dulu, pusat perekonomian hanya ada di kota besar, biaya logistik mahal dan memakan waktu, kriminalitas pun muncul karena kesempatan berusaha sangat terbatas. Untuk bisa memberikan kesempatan yang adil bagi siapapun, infrastruktur harus digarap karena infrastruktur merupakan modal dasar kemajuan Indonesia.



Jadi, pembangunan itu berentetan ke mana-mana, tidak hanya berfungsi untuk satu, tetapi akan berentetan ke mana-mana.



Ir. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia

Sumber: Kagama.co



Sumber Foto: Antara

Dengan infrastruktur maka konektivitas akan terbuka, peluang ekonomi baru bermunculan, lapangan pekerjaan meningkat, waktu dan biaya logistik bisa ditekan. Efeknya, bukan hanya daya saing daerah yang meningkat dan berhasil mengundang investor di wilayah, tapi juga meningkatkan aspek sosial dan pembangunan manusia seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) Trian Yuserma mengungkapkan, biaya pengiriman logistik di Indonesia saat ini sudah semakin murah, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Hal ini tidak terlepas dari masifnya pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.



Pastilah (murah), ya karena infrastruktur itu bagian penting dari proses kelancaran arus barang yang cepat, tepat, dan aman. Idealnya idealnya itu membawa manfaat buat kita semua.

Trian Yuserma
Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo)

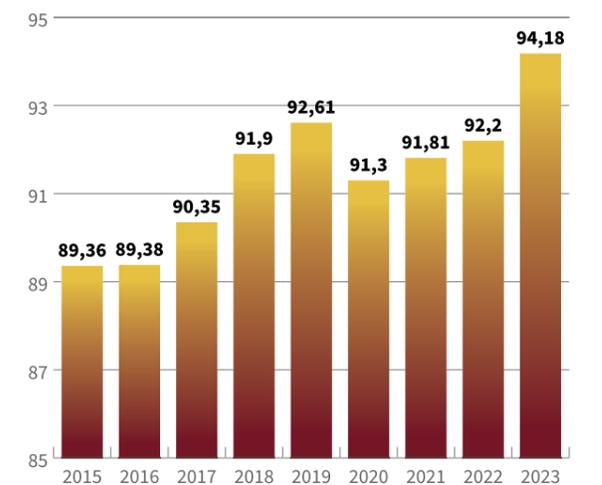
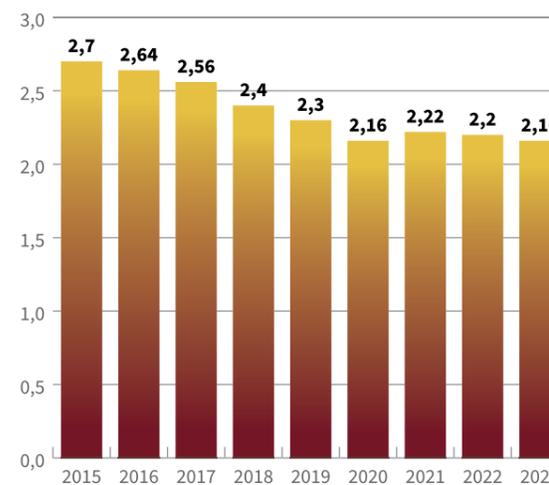
Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2024



Waktu Tempuh

Kemantapan Jalan

2015	2,7 Jam/100km	89,36%
2023	2,16 Jam/100km	94,18%



Sumber: Kementerian PUPR, 2024

Bahkan ketika masa pandemi COVID19, proyek pembangunan infrastruktur disulap menjadi program padat karya yang memberdayakan masyarakat akibat kehilangan pekerjaan. Cara ini efektif menjaga perekonomian lokal dan memberdayakan mereka yang kehilangan

pekerjaan. Ini adalah cerminan nyata dari kepedulian dan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap pembangunan tidak hanya berupa struktur fisik, tetapi juga sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan harapan bagi rakyat.

Capaian Pembangunan Jalan Tol

Tahun 2015-2024

Tahun 2015-2023

2.050km

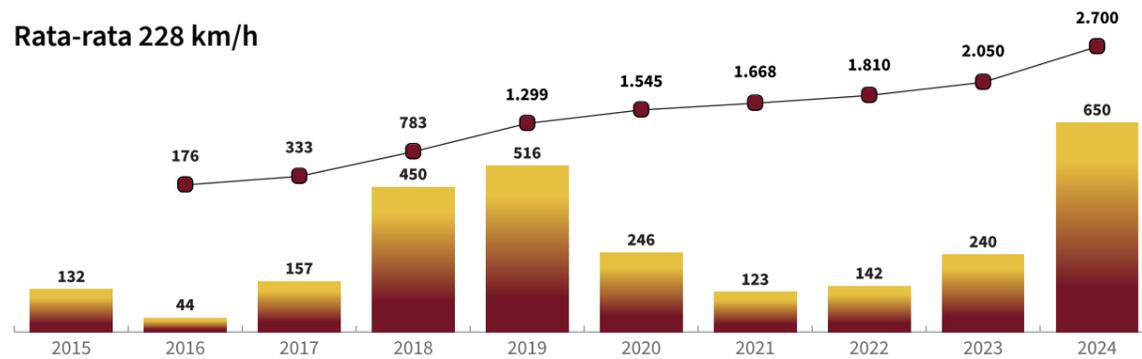
Rata-rata 228 km/h

Tahun 2015-2019

1.299km

Tahun 2020-2023

751km



Sumber: Kementerian PUPR, 2024

Capaian Pembangunan Jembatan

Tahun 2015-2024

Tahun 2015-2023

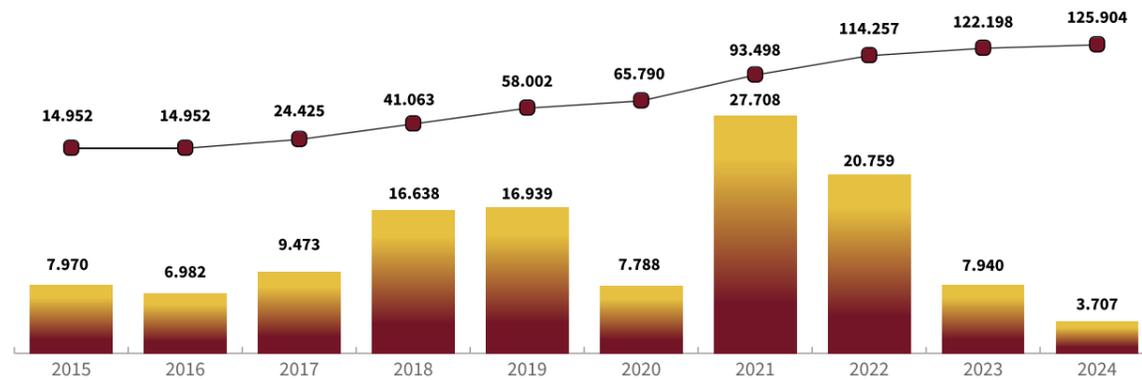
122.198m

Tahun 2015-2019

58.002m

Tahun 2020-2023

64.195m



Sumber: Kementerian PUPR, 2024

Capaian Pembangunan Jalan Nasional

Tahun 2015-2024

Tahun 2015-2023

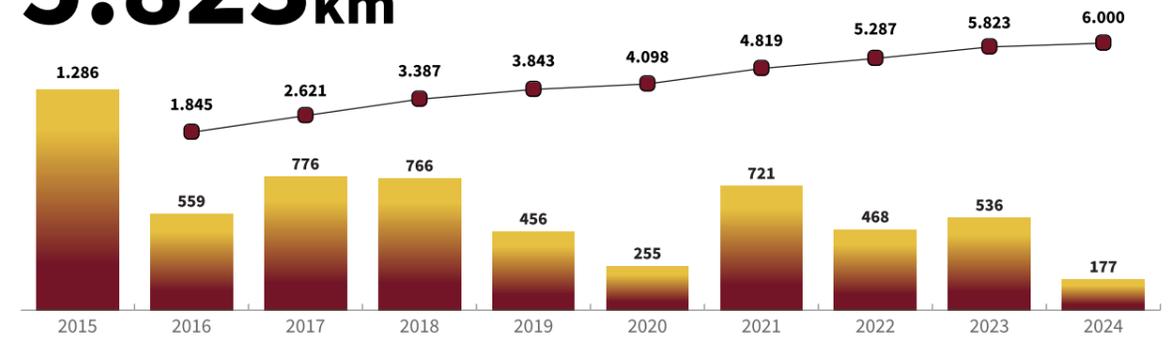
5.823km

Tahun 2015-2019

3.843km

Tahun 2020-2023

1.980km



Sumber: Kementerian PUPR, 2024

Capaian Pembangunan Jembatan Gantung

Tahun 2015-2023

Tahun 2015-2023

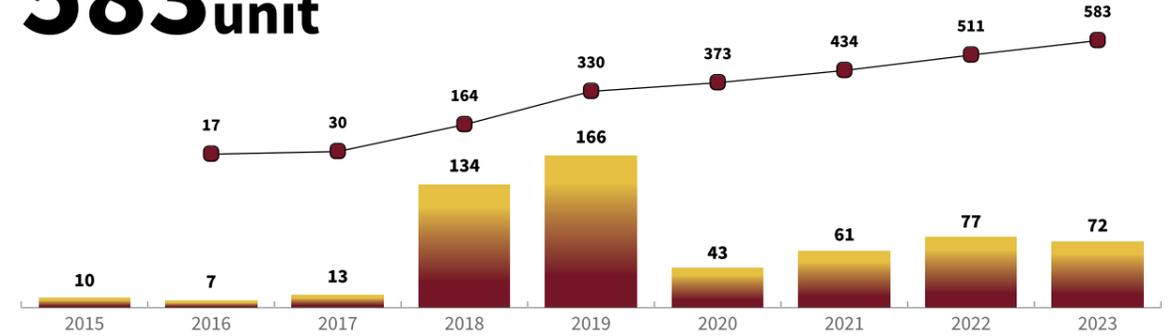
583unit

Tahun 2015-2019

330unit

Tahun 2020-2023

253unit



Sumber: Kementerian PUPR, 2024

Capaian Pembangunan Flyover/Underpass

Tahun 2015-2024

Tahun 2015-2023

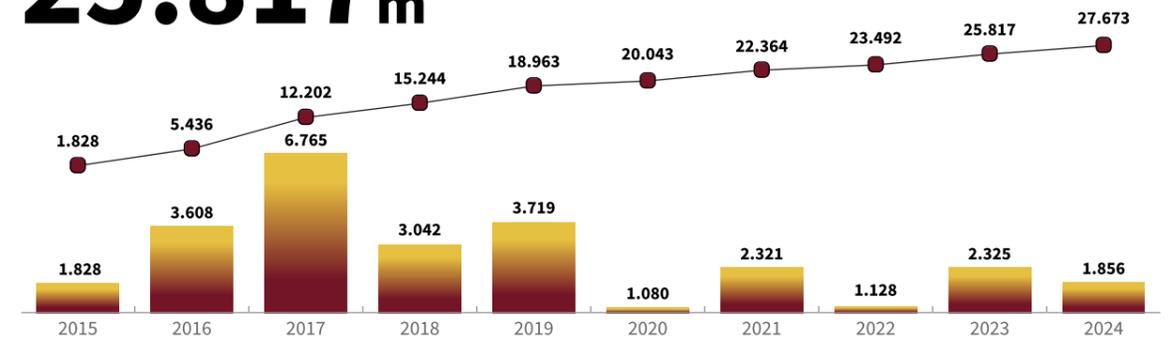
25.817m

Tahun 2015-2019

18.963m

Tahun 2020-2023

6.854m



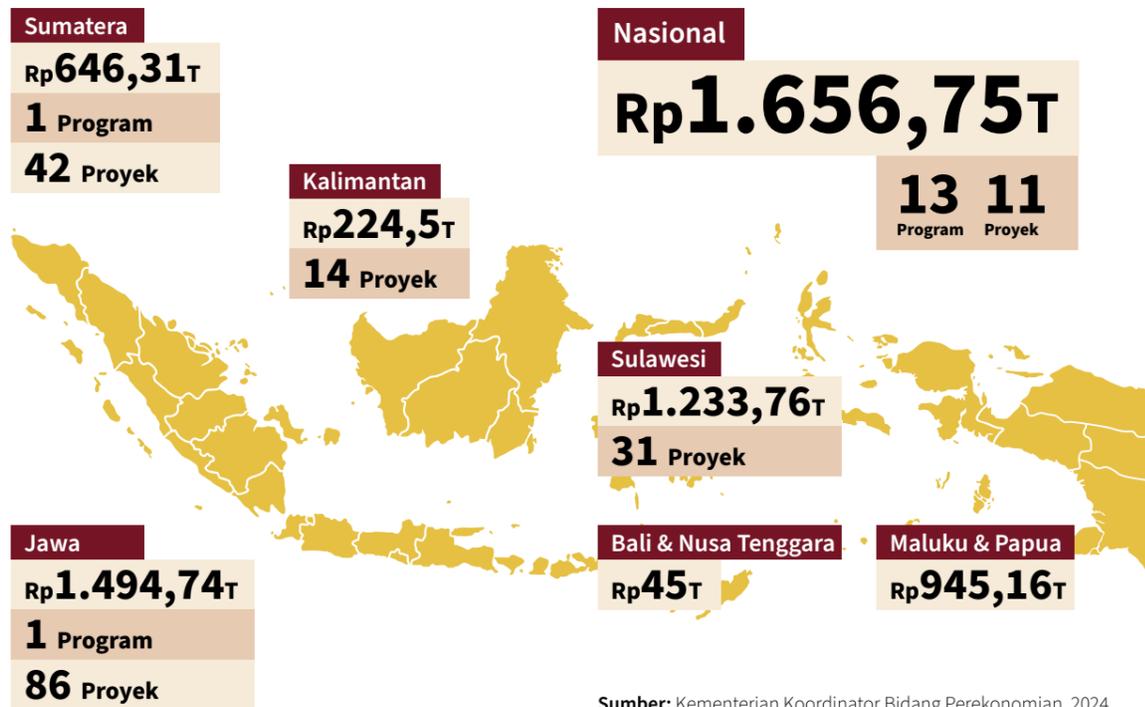
Sumber: Kementerian PUPR, 2024

Jangan hanya melihat pada mega proyek yang dilakukan, tapi lihat juga pembangunan infrastruktur berskala kecil yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat seperti pasar, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan jembatan-jembatan kecil yang memperbaiki aksesibilitas di daerah-daerah terpencil. Selalu ada kenikmatan bisa kita rasakan karena pembangunan infrastruktur dalam sepuluh tahun terakhir ini memang berorientasi pada hasil dan kecakapan dalam memanfaatkannya. Di balik itu semua,

sesungguhnya infrastruktur telah menjadi jembatan yang menghubungkan rakyat dengan kesejahteraan.

Pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi bukan sekedar menumpuk beton, tetapi merupakan investasi strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemantapan infrastruktur menjadi pijakan kuat bagi Indonesia untuk melangkah ke arah masa depan yang lebih makmur dan berkelanjutan

Peta Sebaran Proyek Strategis Nasional

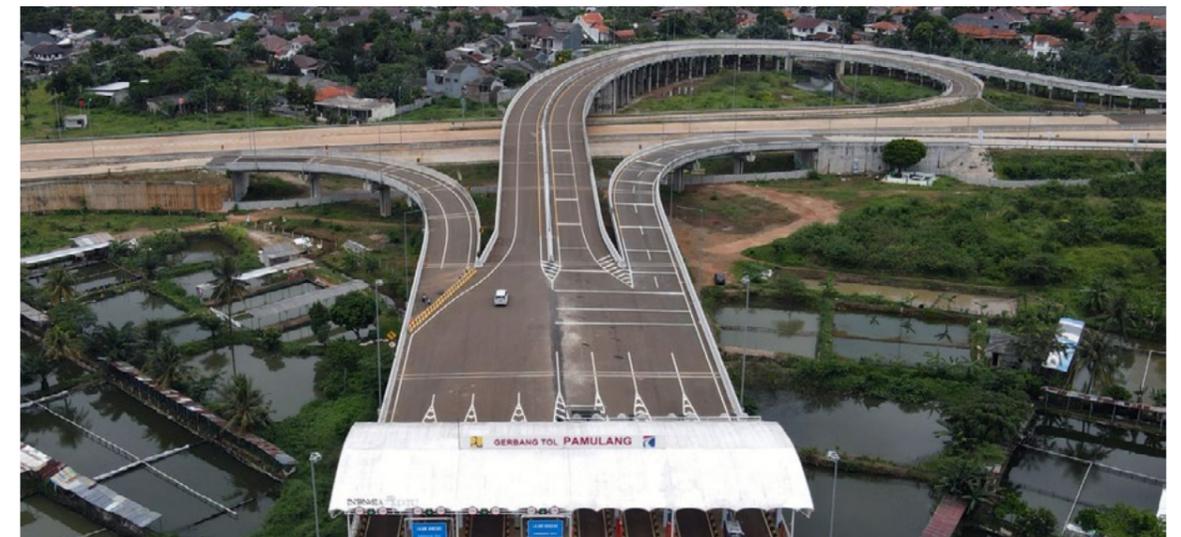
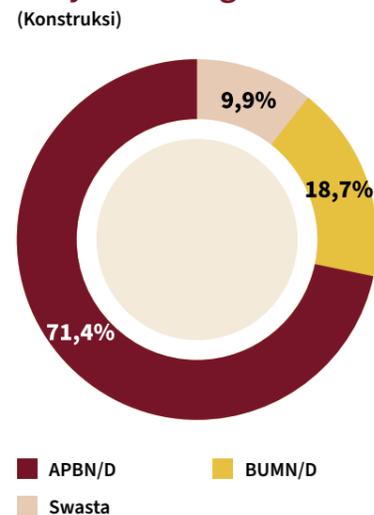


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2024



Sumber Foto: Antara

Estimasi Nilai Investasi Proyek Strategis Nasional (Konstruksi)



Sumber Foto: Antara

Cakupan Sektor Proyek Strategis Nasional

Tingkat Proyek



Tingkat Program



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2024

Capaian Pembangunan SPAM

Tahun 2015-2024

Tahun 2015-2023

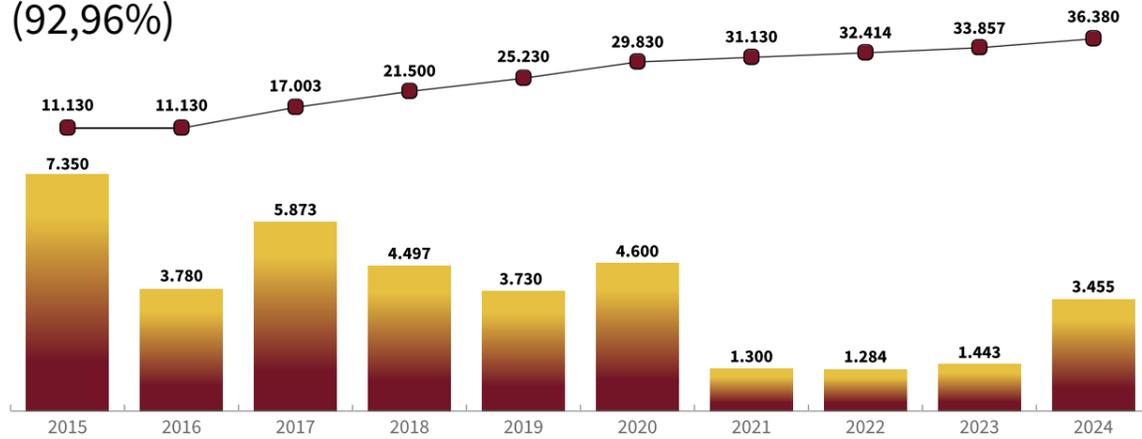
33.857 l/det
(92,96%)

Tahun 2015-2019

25.230 l/det
(89,16%)

Tahun 2020-2023

8.627 l/det
(92,96%)



Sumber: Kementerian PUPR, 2024

● Capaian kumulatif ■ Capaian per tahun

Capaian Sanitasi & Persampahan

Tahun 2015-2024

Tahun 2015-2023

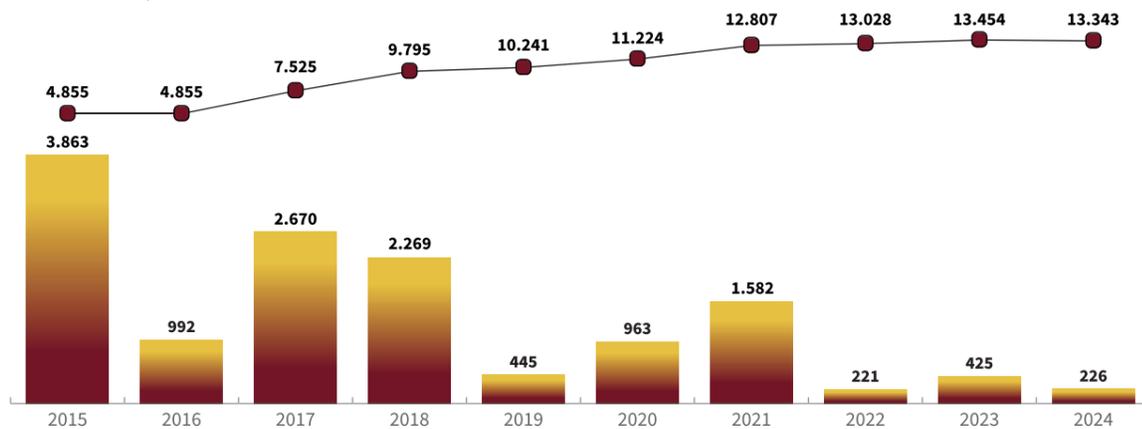
13,5 Juta KK

Tahun 2015-2019

10,3 Juta KK

Tahun 2020-2023

3,2 Juta KK



Sumber: Kementerian PUPR, 2024

● Capaian kumulatif ■ Capaian per tahun

Capaian Pembangunan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Tahun 2015-2024

Pembangunan Tahun 2015-2023

1.181.120 Ha

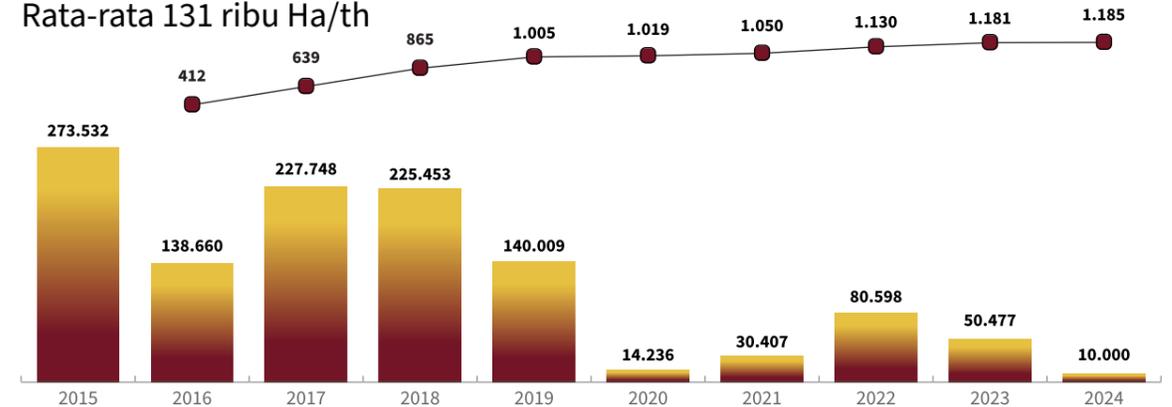
Tahun 2015-2019

1.005.402 Ha

Tahun 2020-2023

175.718 Ha

Rata-rata 131 ribu Ha/th



Sumber: Kementerian PUPR, 2024

● Capaian kumulatif ■ Capaian per tahun

Rehabilitasi Tahun 2015-2023

4.344.868 Ha

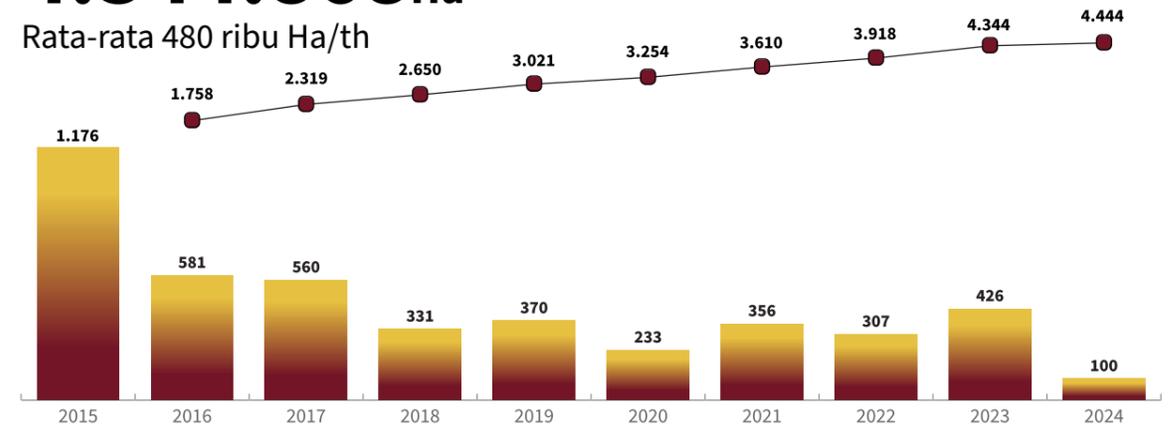
Tahun 2015-2019

3.021.105 Ha

Tahun 2020-2023

1.323.763 Ha

Rata-rata 480 ribu Ha/th

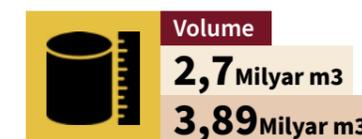
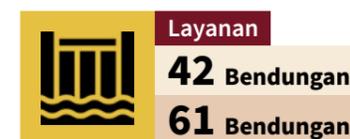


Sumber: Kementerian PUPR, 2024

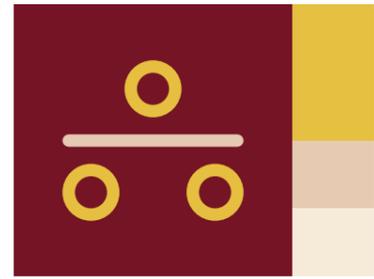
● Capaian kumulatif ■ Capaian per tahun

Capaian Pembangunan Bendungan

Tahun 2015-2024



Sumber: Kementerian PUPR, 2024



Unjuk Gigi Hilirisasi

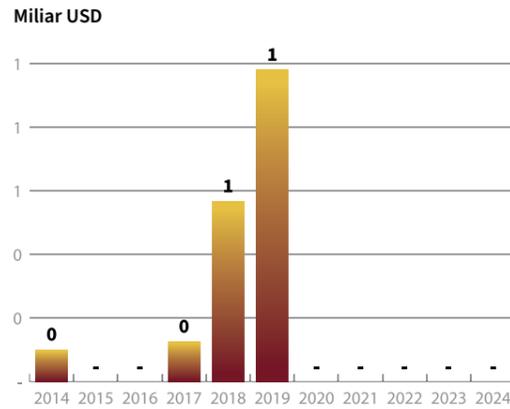
Meski berulang kali ditekan negara-negara Uni Eropa yang menggugat Indonesia ke World Trade Organisation (WTO) atas tuduhan proteksionisme komoditas bijih nikel, kebijakan hilirisasi tetap dijadikan langkah strategis ekonomi-politik masa Presiden Jokowi. Keluar dari perilaku diskriminatif negara-negara industri maju menjadi kunci kemajuan bangsa Indonesia di tengah derasnya arus industrialisasi. Kita ingin keluar dari fenomena kutukan sumber daya alam yang membuat kita sendiri tidak bisa menikmati hasil dari kandungan bumi karena terus menerus diserap negara-negara industri karena kita hanya sebagai pemasok bahan mentah.

Pemerintah dengan berani terus menguatkan langkah untuk digdaya dalam persaingan pasar global. Berbagai aturan diteken, pembangunan

smelter digenjot, daya tahan industri dalam negeri dijaga. Hilirisasi adalah mesin pertumbuhan (engine of growth) yang memanfaatkan keunggulan komparatif Indonesia untuk sejajar dengan negara-negara industri maju. Kesulitan dalam melewati tahap industrialisasi ini merupakan tahapan yang harus dilewati sebagai bagian dari proses modernisasi sebuah negara.

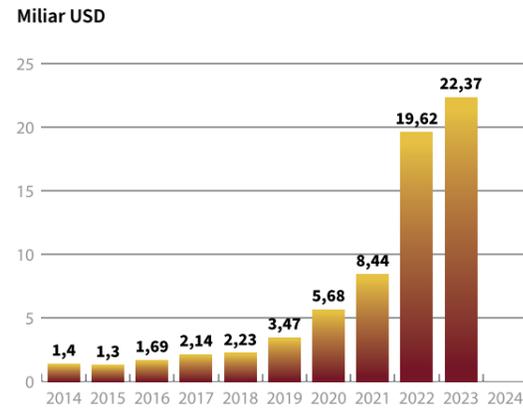
Indonesia telah memulai hilirisasi industri di sektor mineral seperti nikel dan bauksit, serta sektor agro seperti kelapa sawit. Hasilnya sudah terlihat, peningkatan devisa negara, investasi, nilai tambah produk, dan penciptaan lebih banyak lapangan kerja, yang semuanya berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Dan yang paling penting, kebijakan hilirisasi adalah aksi unjuk gigi di depan negara-negara industri maju.

Nilai Ekspor Bijih Nikel

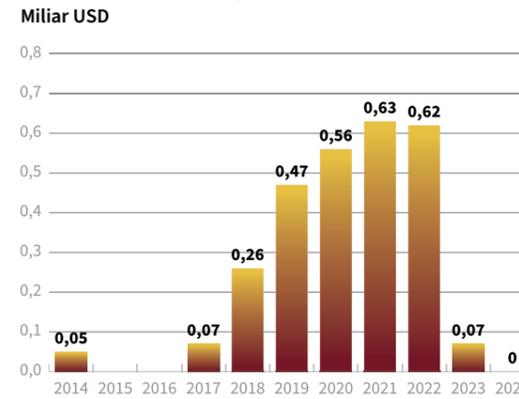


Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024

Nilai Ekspor Produk Olahan Nikel

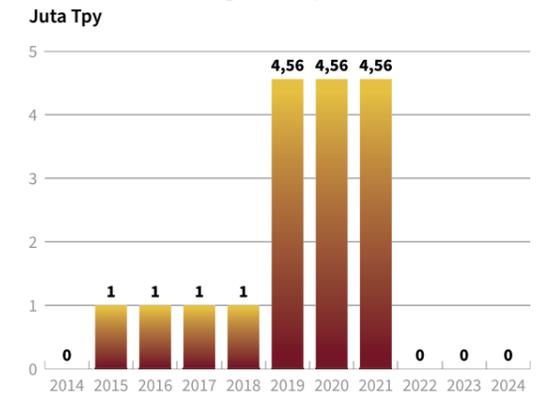


Nilai Ekspor Bijih Bauksit

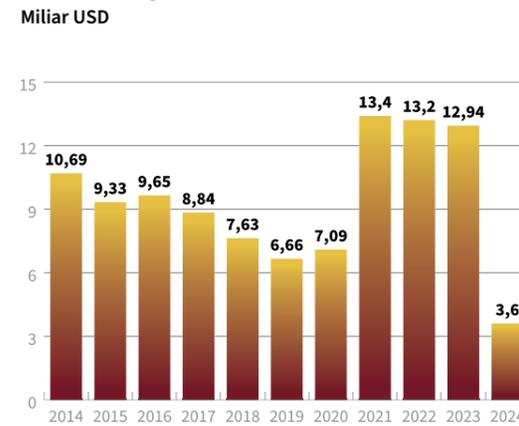


Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024

Jumlah Tenaga Kerja Smelter Bauksit

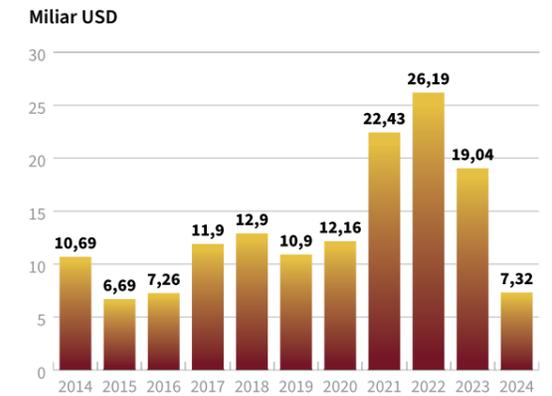


Nilai Ekspor RBD Olein

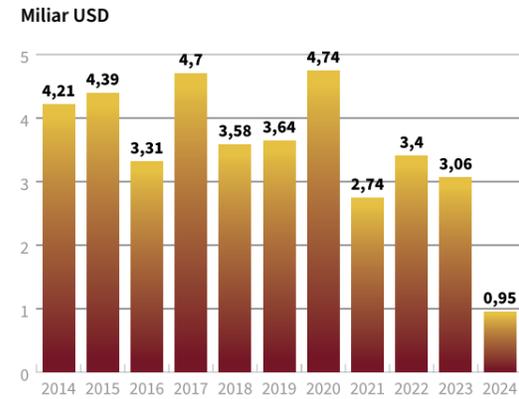


Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024

Nilai Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit Lain

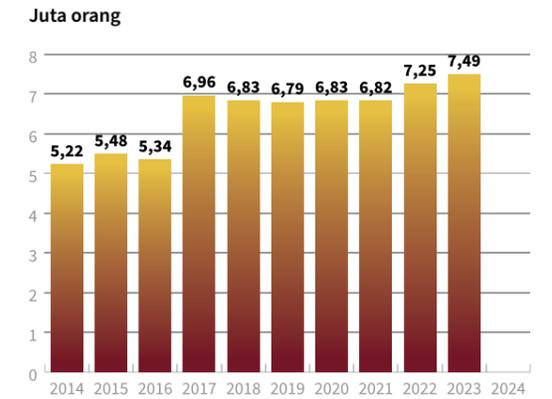


Nilai Ekspor CPO



Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024

Jumlah Tenaga Agro



Fondasi yang telah dibangun dengan jerih payah perlu diperkuat dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperbaiki tata kelola pengelolaan komoditas di dalam negeri.

Ibarat benih yang tumbuh menjadi tanaman bermanfaat, kebijakan hilirisasi jangan dibabat namun harus dilanjutkan.



Sumber Foto: Antara



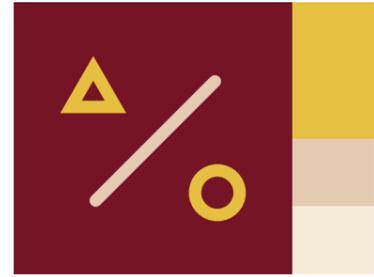
Sumber Foto: Antara



Sumber Foto: Antara



Sumber Foto: Antara



Transformasi Digital

Transformasi digital menawarkan potensi yang sangat besar. Dari sisi bisnis, transformasi digital mengubah perekonomian dengan kecepatan dan skala yang tinggi. Dari perspektif tata kelola, transformasi digital berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mempersingkat birokrasi, korupsi, penghindaran pajak, dan memfasilitasi interaksi warga negara dengan pemerintah mereka. Bagi masyarakat, transformasi digital menjanjikan peningkatan penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, memfasilitasi inklusi dan komunikasi sosial, serta meningkatkan kesejahteraan. Terakhir, transformasi digital dapat berdampak positif pada keberlanjutan lingkungan melalui pengelolaan dan penanganan limbah yang lebih cerdas, pencegahan dan pengendalian polusi, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Dari dampak positif ini semua, digitalisasi bukan sekedar pilihan atau kemewahan tapi sebuah keharusan untuk tetap relevan dan kompetitif di era yang serba cepat. Indonesia telah menentukan

jalannya. Pandemi COVID19 memberikan momentum perubahan pola pikir masyarakat untuk melakukan konversi digital di setiap lini kehidupan. Bukan hanya memaksa proses belajar-mengajar secara online, tapi juga mendorong pelaku usaha kecil berjualan via dunia maya. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, jumlah transaksi digital selama PSBB bulan April 2020 mencapai 64,48 persen, dan volume transaksi digital juga tumbuh sebesar 37,35 persen secara years on years. Masyarakat telah beralih ke platform digital yang memungkinkan mereka untuk tetap dapat beraktivitas dan bersosialisasi di tengah pandemi. Dengan meletakkan fondasi transformasi digital, kualitas layanan publik meningkat pesat serta menghasilkan keandalan baru di tiap wilayah.

Pembangunan infrastruktur digital menjadi modal awal untuk memberikan akses internet kepada semua orang sehingga tidak ada lagi blank spot terutama di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

“

Guru menggunakan akses internet BAKTI AKSI untuk mengakses Platform Merdeka Belajar. Kegiatan belajar mengajar mengatasi masalah kejenuhan peserta didik. Dengan adanya internet, guru dapat memvisualisasikan materi ajar.

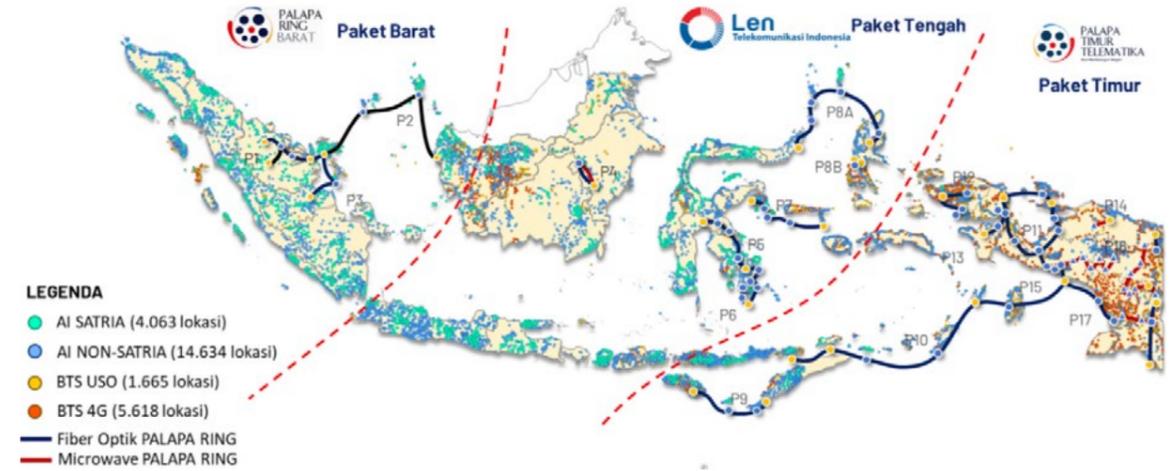
”

Ramayana

Guru Honorer SMP Negeri di Pulau Komodo

Sumber:
Bakti Kominfo

Peta Sebaran Layanan Akses Internet, BTS & Palapa Ring Bakti



Total Akses Internet 18.697 lokasi
Total BTS On Air 7.283 lokasi

Sumber: Bakti Kominfo, 2024

Total Utilisasi Palapa Ring
FO 766 Gbps + MW 4700 Mbps

Akses internet juga mengefektifkan mesin pelayanan publik menuju smart government. Tengok saja Mall Pelayanan Publik yang mempermudah masyarakat untuk mengurus perizinan tanpa harus berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Belum lagi, beragam aplikasi digital yang menjadi inovasi pemerintah daerah untuk memberikan keleluasaan bagi siapa pun dan di mana pun. Salah satu yang menonjol adalah Early Diagnosis and Treatment di Teluk Bintuni yang berhasil menurunkan prevalensi

malaria di Bumi Cendrawasih. Pada 2017, program ini berhasil mereduksi penyebaran malaria dari angka 9,2 persen ke angka 0,02 persen di 12 desa. Selain mengurangi penyebaran, program ini juga sukses mengurangi tingkat morbiditas malaria dari 115 penderita per 1000 penduduk (2009) menjadi 5 penderita malaria dari 1000 penduduk (2016). Tidak heran, terobosan ini diganjar penghargaan dari United Nations Public Service Awards (UNPSA) dalam kategori Menjangkau yang Paling Miskin dan Rentan Melalui Layanan Inklusif.



Sumber Foto: Antara

“

Saya berharap kualitas dan fasilitas pelayanan yang sudah baik ini dapat dipertahankan. Sehingga pelayanan yang prima bisa terus dirasakan masyarakat. Saat ini saya sedang mengurus izin trayek angkutan kota (angkot). Adanya Mal Pelayanan Publik ini lebih enak dan lebih mudah.



Sumber: malangkota.go.id

Aminnudin
Warga Kota Malang

“

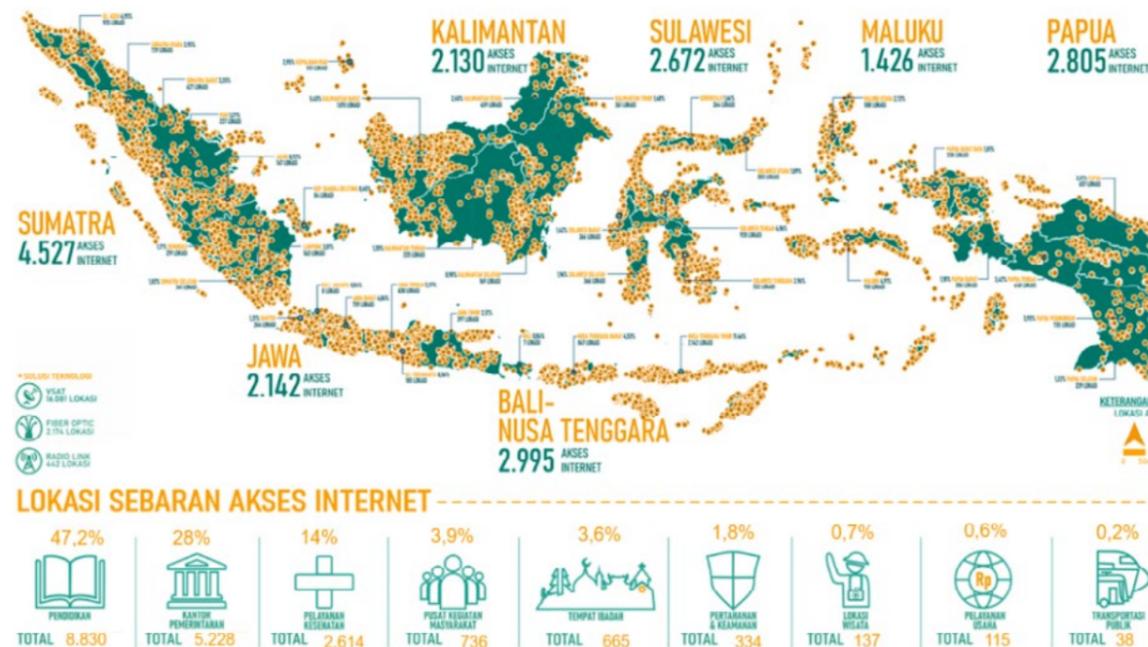
Saya baru saja menyelesaikan proses perpanjangan IMTA. Prosesnya berjalan lancar, petugas pelayanan sangat membantu, kami (warga negara asing) tidak membutuhkan agen (calo). Saya sangat suka dengan pelayanan PTSP.



Sumber: PTSP DKI Jakarta

Esther
Warga Negara Nigeria

Peta Sebaran Akses Internet Berdasarkan Kategori Layanan



Sumber: Bakti Kominfo, 2024

Digitalisasi pun mendorong daya saing dan kemudahan berinvestasi di Indonesia. Penerapan Online Single Submission (OSS) terbukti telah memudahkan pelaku usaha dalam pengurusan izin, e-catalog untuk produk UMKM, serta penerapan teknologi keuangan seperti e-commerce dan QRIS.

Transformasi digital dengan semua fondasi yang telah dibangun selanjutnya akan terus dikembangkan dalam ekosistem Inadigital guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, terpercaya, dan efisien.

“

Biar ndak ribet, pak. Ndak perlu repot cari kembalian, tukar uang besar ke sana kemari, nggak ribet, uangnya bisa langsung masuk rekening.

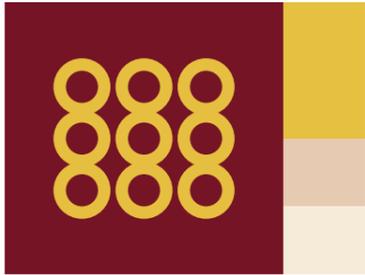


Sumber: Bank Indonesia Prov Lampung

Budhe Sam
Pedagang Jamu di Lampung



Sumber Foto: Antara



To Respect and To Protect Human Rights

Pemerintah tidak pernah abai terhadap perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di setiap sektor. Demikian pula terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Pintu penyelesaian melalui pengadilan tetap terbuka jika ditemukan bukti-bukti kuat di kemudian hari. Namun di sisi lain, hak-hak korban dan keluarganya mendesak untuk segera ditangani. Pemulihan hak-hak mereka tidak bisa ditunda-tunda, sekalipun penyelesaian melalui mekanisme pengadilan masih terus diupayakan. Selangkah demi selangkah, negara hadir dengan dasar kemanusiaan untuk pemulihan.

Langkah pemulihan hak korban ini bukanlah tanpa pertentangan. Masih banyak yang meragukan komitmen pemerintah untuk benar-benar menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu hingga tuntas. Pemulihan hak korban dianggap sebagai langkah kompromi tanpa keseriusan untuk mengungkapkan kebenaran dan hanya akan melanggengkan impunitas. Memahami kondisi batin para keluarga korban,

Presiden Jokowi berulang kali menyatakan bahwa pemulihan hak korban bukan menghilangkan proses investigasi yang terus dilakukan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Presiden bahkan berharap langkah non-judisial ini dapat menjadi langkah berarti dalam pemulihan luka sesama anak bangsa.

Tidak hanya fokus pada penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu, pemajuan perlindungan HAM juga diwujudkan dengan berbagai upaya konkret yang meletakkan perempuan, anak, penyandang disabilitas, tenaga kerja, dan masyarakat sebagai fokus konsentrasinya. Komite Nasional Disabilitas dibentuk di 2021 sebagai komitmen Indonesia dalam mematuhi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas untuk Perlindungan dan Penghormatan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Ini adalah langkah awal atas kesetaraan penyandang disabilitas untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, Indonesia yang ramah terhadap disabilitas.

“

Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana, tanpa menegasikan penyelesaian yudisial.

”

Ir. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia

Sumber:
Setneg.co.id

Bukan hanya itu, pemerintah juga menaruh perhatian pada potensi pelanggaran HAM di sektor bisnis. Oleh karena itu, diperlukan sebuah acuan untuk menerapkan prinsip HAM di dalam proses bisnis yang disahkan pada tahun 2023 dalam sebuah Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Dalam memenuhi tugas untuk melindungi, negara berkewajiban untuk memberikan panduan yang efektif kepada pelaku usaha tentang bagaimana menghormati HAM dalam

menjalankan bisnis mereka. Perusahaan bisnis didorong untuk mampu mempertimbangkan secara efektif persoalan gender, kerentanan dan/atau marginalisasi, mengakui tantangan khusus yang mungkin dihadapi oleh masyarakat asli, perempuan, kelompok etnis atau warga minoritas, kelompok agama atau linguistik minoritas, anak-anak, penyandang cacat dan pekerja migran dan keluarganya.

2020

UU Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas

- Komisi Nasional Disabilitas adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen.
- Dalam rangka memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk KND yang bersifat independen.
- KND mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

2023

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum & HAM

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai TUGAS menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
- Unit Eselon I yang membidangi HAM yaitu Direktorat Jenderal HAM

2023

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan rekomendasi Tim PPHAM berupa:

- a. memulihkan hak korban atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara adil dan bijaksana; dan
- b. mencegah agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi.

2023

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Pengaturan Stranas BHAM meliputi:

- a. kewajiban kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melindungi HAM pada kegiatan usaha;
- b. tanggung jawab Pelaku Usaha untuk menghormati HAM; dan
- c. akses atas pemulihan bagi korban dugaan pelanggaran HAM di kegiatan usaha.



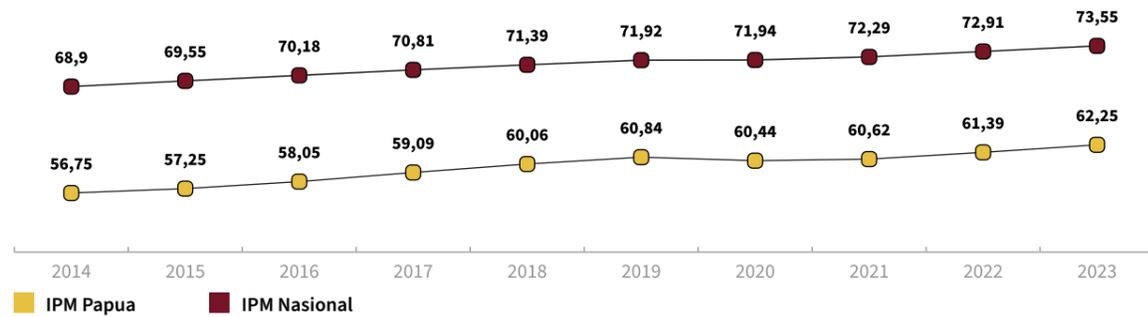
Papua adalah Tanah Damai

Sepuluh tahun ini, kondisi damai terus dipertahankan agar Papua menjadi lebih sehat, cerdas dan produktif. Menjadi sehat, cerdas dan produktif adalah hak setiap orang di Papua. Untuk itu, pembangunan infrastruktur digenjot

habis-habisan demi mendekatkan mereka pada pelayanan kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan puskesmas menjadi harapan bagi anak-anak Papua.

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua

Tahun 2014-2023



IPM Provinsi Papua Menurut Dimensi Penyusunnya, Tahun 2014-2023

Komponen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun)	64,84	65,09	65,12	65,14	65,36	65,65	65,79	65,93	66,23	66,44
Harapan Lama Sekolah (tahun)	9,94	9,95	10,23	10,54	10,83	11,05	11,08	11,11	11,14	11,15
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	5,76	5,99	6,15	6,27	6,52	6,65	6,69	6,76	7,02	7,15
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Rp000)	Rp6.416	Rp6.469	Rp6.637	Rp6.996	Rp7.159	Rp7.336	Rp6.954	Rp6.955	Rp7.146	Rp7.562

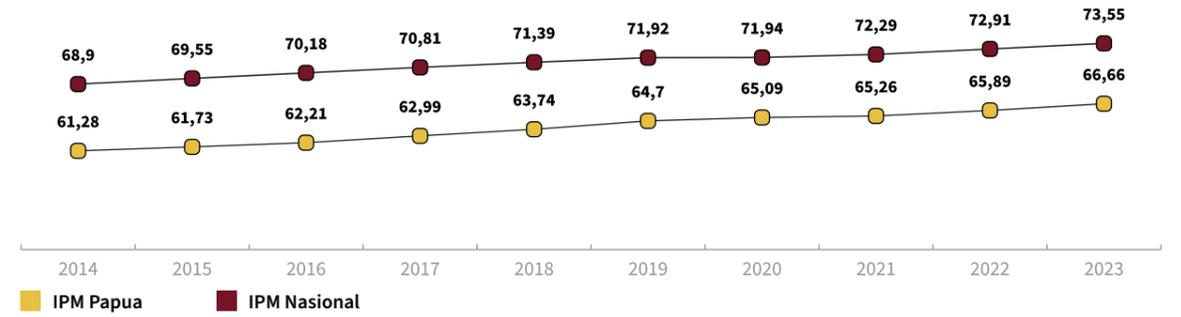
Sumber: BPS, 2024



Sumber Foto: Antara

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat

Tahun 2014-2023



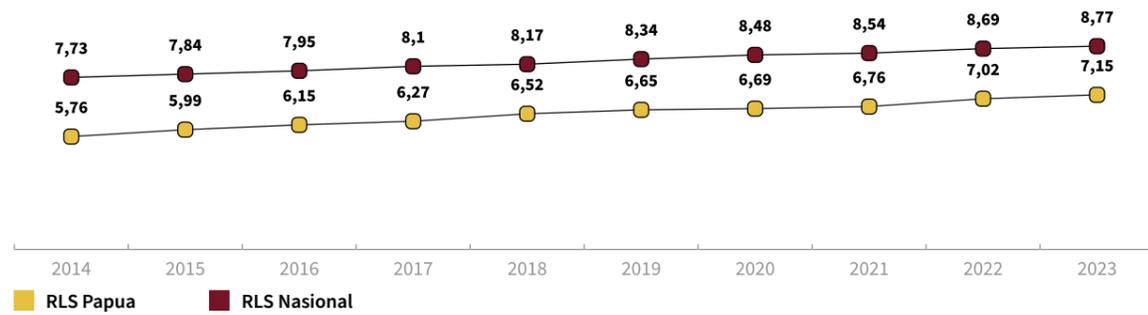
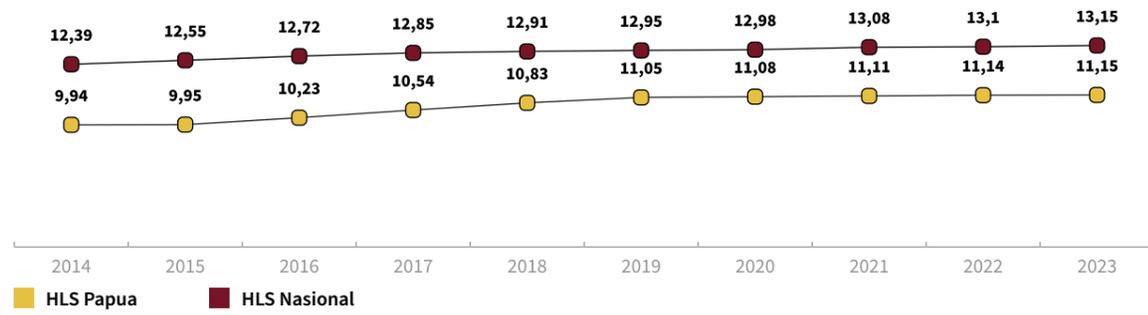
IPM Provinsi Papua Menurut Dimensi Penyusunnya, Tahun 2014-2023

Komponen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun)	65,14	65,19	65,3	65,32	65,55	65,9	66,02	66,14	66,46	66,79
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,87	12,06	12,26	12,47	12,53	12,72	12,91	13,13	13,21	13,34
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6,96	7,01	7,06	7,15	7,27	7,44	7,6	7,69	7,84	7,93
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Rp000)	Rp6.943	Rp7.063	Rp7.175	Rp7.493	Rp7.816	Rp8.125	Rp8.086	Rp7.929	Rp8.101	Rp8.404

Sumber: BPS, 2024

Harapan Lama Sekolah (HLS) & Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Papua

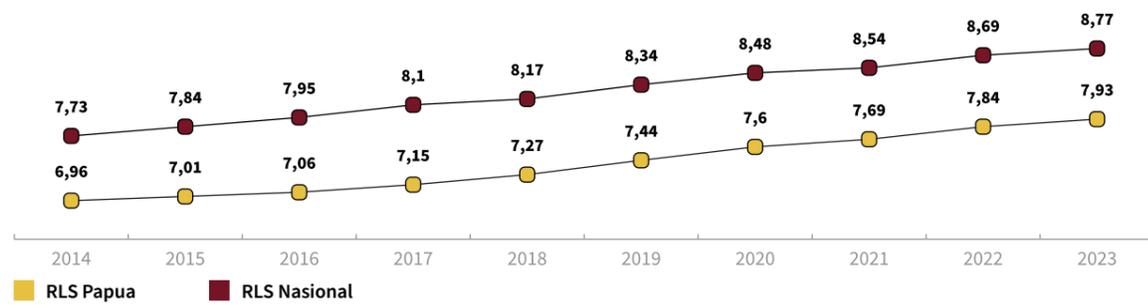
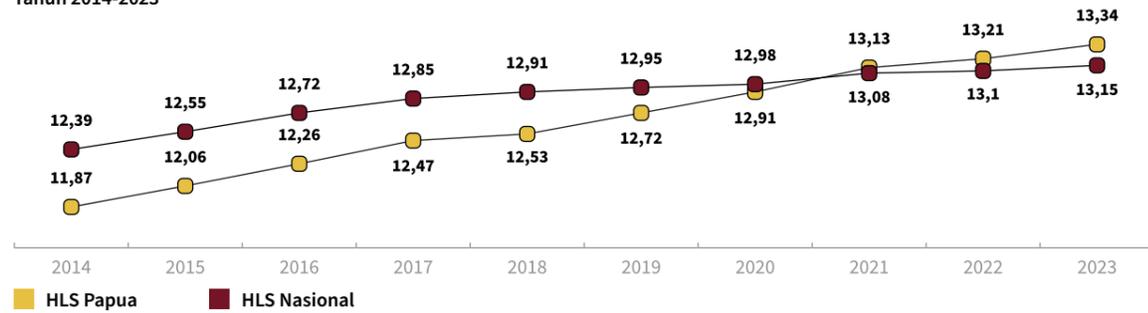
Tahun 2014-2023



Sumber: BPS, 2024

Harapan Lama Sekolah (HLS) & Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Papua Barat

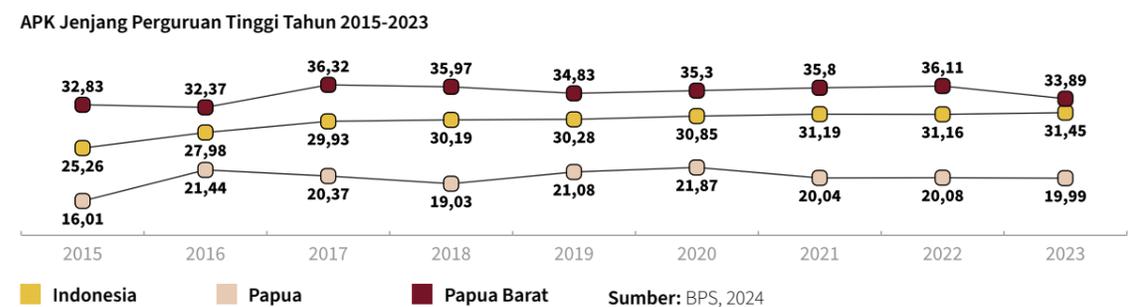
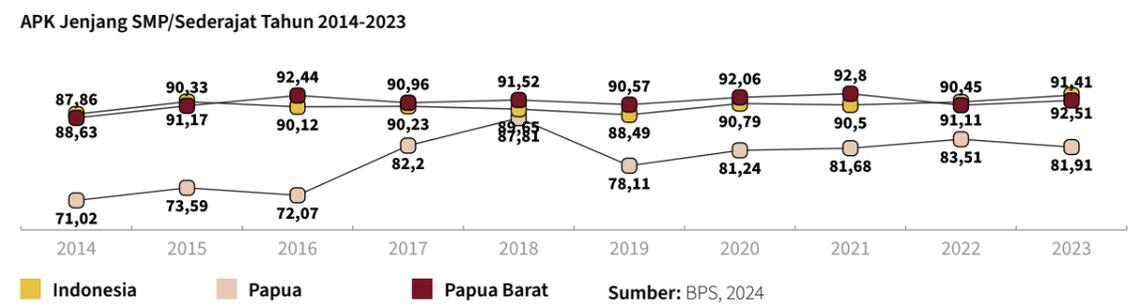
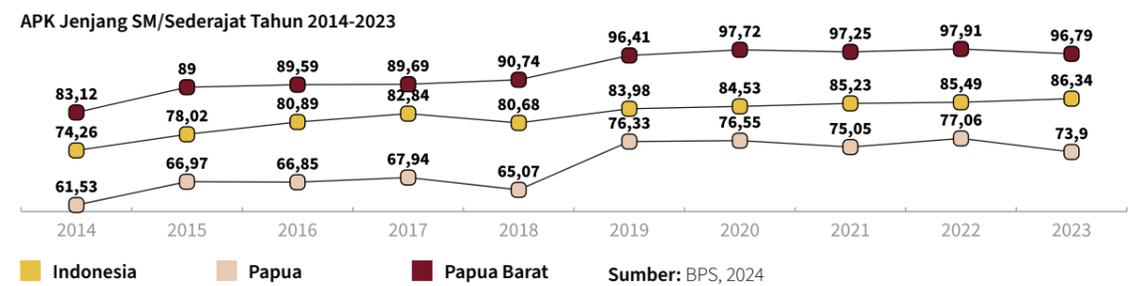
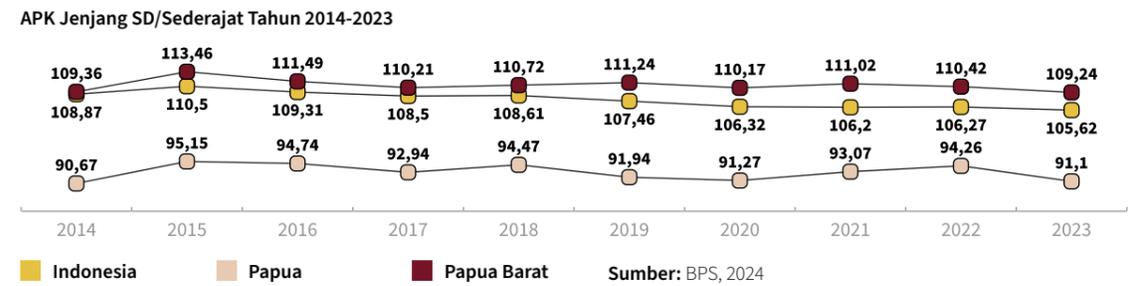
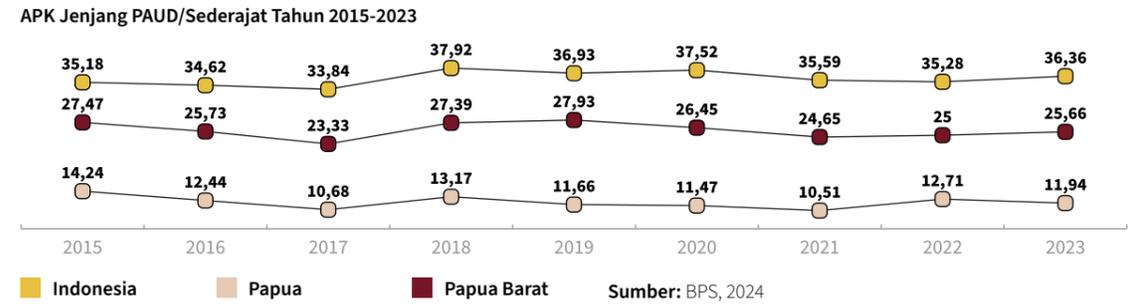
Tahun 2014-2023



Sumber: BPS, 2024

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Papua & Papua Barat

Dalam satuan (%)



Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara pasifik, pembangunan Papua tidak bisa dilepaskan dari konteks kerjasama kawasan. Pemerintah tanpa henti terus melakukan diplomasi di pasifik dengan merangkul mitra-mitra strategis seperti Papua Nugini dan Republik Kepulauan Fiji, tanpa mengabaikan negara-negara lainnya seperti Nauru, Kepulauan Cook, Kepulauan Mikronesia dan lain-lain. Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk terlibat dan turut menentukan arah berkembangnya kawasan Pasifik dan Samudra Hindia demi menjaga

stabilitas keamanan dan perdamaian yang berujung pada perkembangan ekonomi.

Walaupun dalam perjalanannya penuh tantangan, kehadiran infrastruktur-infrastruktur baru di Papua berhasil mengangkat Indeks Pembangunan Manusia di Papua, mengangkat angka harapan sekolah, melahirkan lebih banyak talenta unggul, serta pelayanan publik yang lebih berkecakapan. Dari aspek kesehatan, angka malaria berhasil diturunkan. Begitu juga dengan angka kematian ibu, penularan Tuberkulosis dan HIV/AIDS.

“

Kita sangat bersyukur atas prestasi ini, dan tentunya atas doa restu semua penyelenggara pelayanan publik di Indonesia.

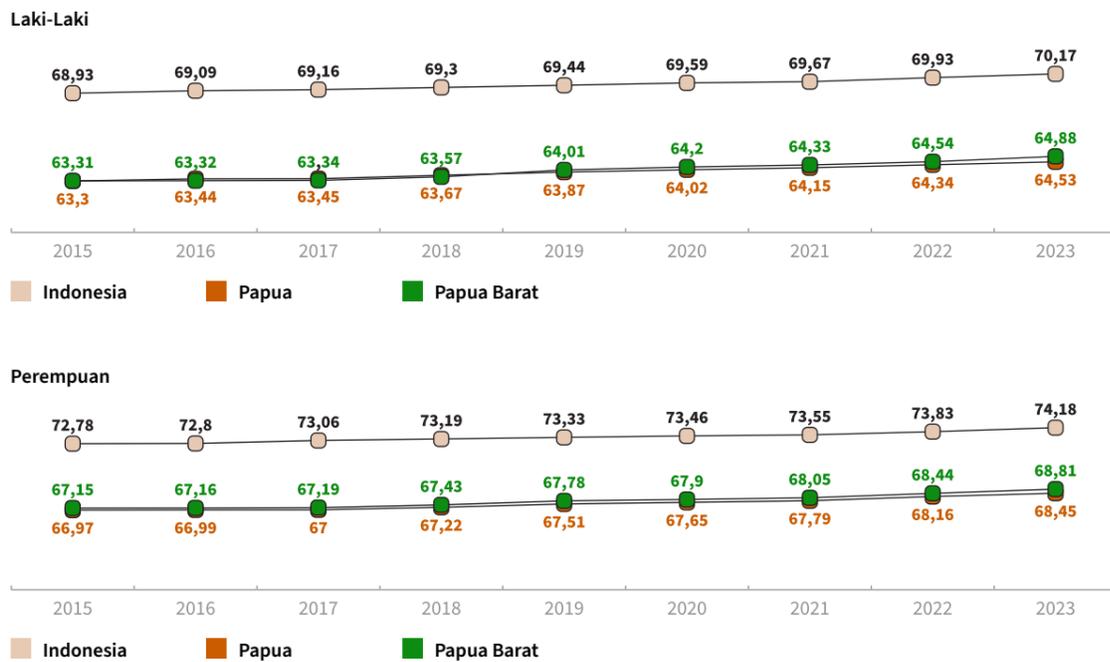
Diah Natalisa

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB

Sumber: Kementerian PANRB



Angka Harapan Hidup Menurut Provinsi & Jenis Kelamin



Sumber: BPS, 2024

Langkah-langkah berani juga dilakukan di bidang olahraga. Siapa sangka hajatan PON dan PEPARNAS di 2021 berlangsung sangat baik di Bumi Cendrawasih. Tidak hanya gelanggang olah raganya yang terbangun megah, perputaran uang di Papua meningkat signifikan dan memicu kewirausahaan lokal untuk berani bersaing.

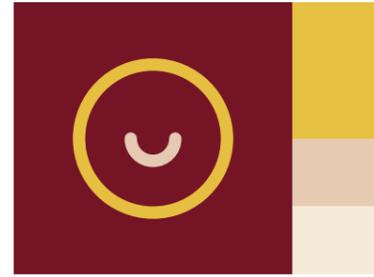
Pembangunan kesejahteraan di Papua tidak akan selesai hanya dalam 10 tahun. Dibutuhkan kerja keras dan komitmen tinggi untuk membawa kemajuan lebih tinggi di tahun-tahun mendatang. Stabilitas keamanan, kedamaian dan kesejahteraan Papua tentu membutuhkan dukungan berkelanjutan dari semua pihak, termasuk masyarakat Papua itu sendiri.



Sumber Foto: Antara



Sumber Foto: Antara



Menjaga Semangat Desa Tetap Berpijar

Gerak cepat melaksanakan amanat Undang-Undang tentang Desa telah membawa manfaat besar bagi desa untuk membangun dirinya, menggali potensi dan terus berinovasi. Munculnya

desa sebagai sentra wisata, pertanian, dan industri semakin menebalkan status desa bukan lagi terpinggirkan. Desa dengan kemandiannya mampu menjadi pusat pertumbuhan baru.

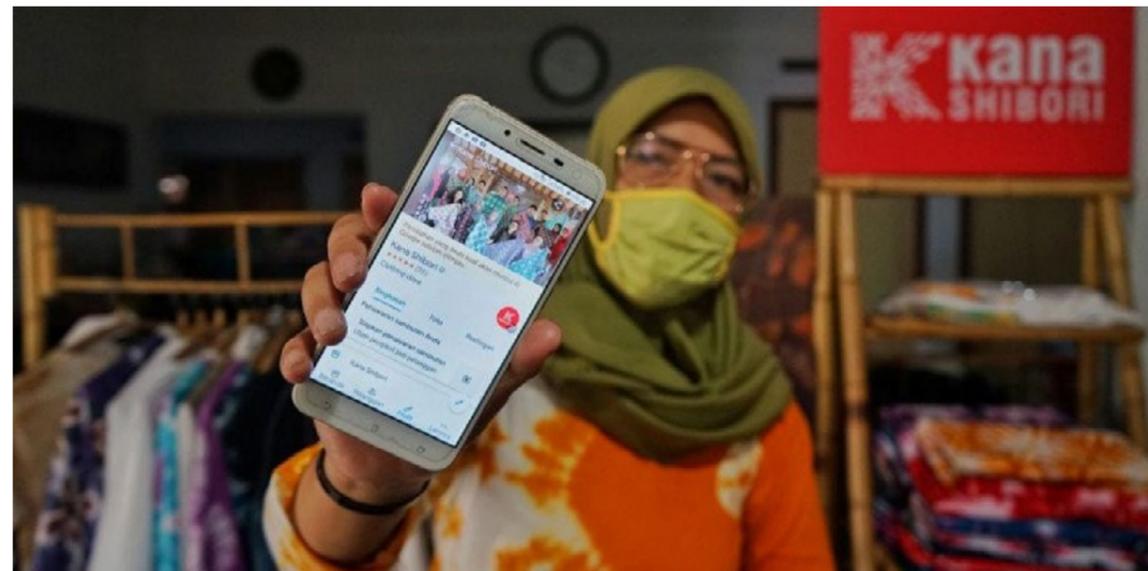
“

Banyak manfaat yang diterima ibu-ibu dari pengelolaan dana desa, seperti pemberian pelatihan salah satunya untuk meningkatkan ekonomi keluarga terutama ibu-ibu yg ikut pelatihan batik, untuk pemasaran kami selain belajar offline karena ada stand UMKM di Bendungan Sari, kami juga dapat pelatihan penjualan secara online ini sangat bermanfaat sekali.

”

Sumber:
Kementerian Desa
PDTT, 2024

Ani
Pelaku UMKM Desa Toyomarto, Kab. Malang

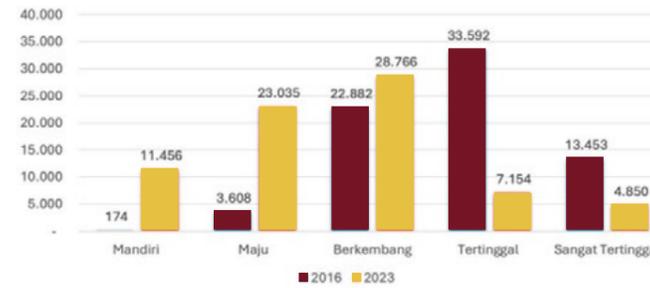


Sumber Foto: Antara

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2023, kemandirian desa terus meningkat. Terjadi lompatan yang signifikan terhadap jumlah Desa Mandiri dan Desa Maju, serta penurunan tajam pada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.

Perkembangan Kemandirian Desa

Berdasarkan IDM 2016 & 2023



Berdasarkan IDM 2023, Kemandirian Desa terus meningkat. Terjadi lompatan yang signifikan terhadap jumlah Desa Mandiri dan Desa Maju, serta penurunan tajam pada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemandirian desa yaitu adanya kebijakan Dana Desa yang sudah disalurkan sejak tahun.

IDM mencakup Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan yang berfungsi memberikan arah ketepatan intervensi kebijakan pembangunan Desa

Status perkembangan desa menurut ID menjadi salah satu basis penentuan jumlah Dana Desa di suatu Desa

Mengacu pada IDM, hanya terdapat 174 Desa Mandiri pada tahun 2016, dan meningkat menjadi 11.456 Desa Mandiri pada 2023 (Melebihi Target RPJMN 2020-2024)

Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2024

Guyub mengawal realisasi Dana 1 milyar per Desa telah menghasilkan sejumlah kenikmatan. Dari membangun jalan yang menghubungkan dan menghidupkan desa, membangun jembatan penghubung harapan hingga fasilitas yang menyempurnakan keseharian.

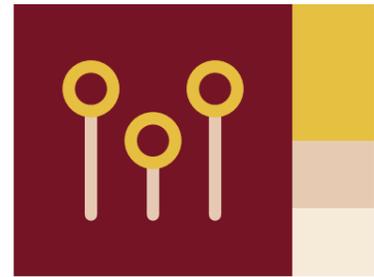
Capaian Output Dana Desa Tahun 2015-2024

Per Agustus 2024



Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2024

Melanjutkan program ini berarti melanjutkan cerita kemajuan. Menjaga api semangat desa tetap menyala, memupuk kesejahteraan yang lebih merata bagi semua.



Diplomasi yang Menyala

“

Politik kita bebas aktif, berteman dengan semua negara, namun yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

”

Ir. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia

Sumber:
Kagama.co

Setiap dolar yang digunakan untuk politik luar negeri harus membawa kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Diplomasi ekonomi dikembangkan untuk terus membawa concrete deliverables atau kerja nyata bagi kepentingan nasional. Reputasi Indonesia meningkat seiring aktifnya Indonesia dalam keanggotaan dan keketuaan di organisasi-organisasi internasional.

Dalam 10 tahun, pemerintah berperan besar dalam menghadapi tantangan global modern, antara lain dengan menjadi champion dalam The Global Crisis Response Group, mendorong berlanjutnya Black Sea Grain Initiative melalui mekanisme G20 Indonesia, menginisiasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific serta penyaluran Indonesia Aid kepada negara-negara yang membutuhkan.



2.452

Prakarsa/Rekomendasi



94

Pencalonan Indonesia



668

Pertemuan/Forum Dipimpin

Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2024

Indonesia mendorong berbagai kesepakatan di berbagai sektor kehidupan. Pandemic Fund berhasil dikumpulkan USD 1,5 Miliar untuk meningkatkan kesiapan berbagai negara berkembang dalam menghadapi pandemi.

Berbagai kerjasama global yang terkoordinasi juga didorong melalui World Water Forum 2024 demi terciptanya akses air bersih yang adil bagi semua orang di seluruh dunia.

Peran dan Kepemimpinan Indonesia 2014 - 2019

Prakarsa/rekomendasi Indonesia, antara lain:

- Pledges kontribusi Indonesia bagi MPP PBB pada Leader's Summit di PBB, New York, September 2015.
- Disahkannya Ranres usulan Indonesia tentang "Sustainable Coral Reefs Management" pada 2nd UNEA, Kenya, Mei 2016.
- Prakarsa pembentukan Archipelagic & Island States (AIS) Forum dalam Ministerial Meeting AIS Forum ke-1 di Manado, 2 November 2018.
- 1 Satgas Rapid Deployment Battalion (RDB) ke MONUSCO di RD Kongo, November 2018.
- 1 Satgas Formed Police Unit (FPU) ke MINUSCA, Rep. Afrika Tengah pada 2019.



Sumber Foto: Antara

Peran dan Kepemimpinan Indonesia 2020-2024

Prakarsa/rekomendasi Indonesia, antara lain:

- Inisiatif Indonesia di G20 dalam outcome documents & Leaders' Declaration pada KTT G20, Bali, November 2022 mengenai antara lain:
 1. Connectivity & Post-Covid-19 Recovery
 2. Building Global Health System Resilience
 3. Harmonizing Global Health Protocol Standards



Sumber Foto: Antara

Peran dan Kepemimpinan Indonesia 2020 - 2024

Pertemuan dipimpin Indonesia, antara lain:

- COVAX Advanced Market Commitment Summit, 8 April 2022. Presiden RI sebagai cohost pertemuan.
- The 3rd World Conference on Creative Economy, Bali, Oktober 2022. Pertemuan mengadopsi "Bali Creative Economy Roadmap 2022".



Sumber Foto: Antara

Bantuan Indonesia Ke Palestina

- Tahap 1: 4 November 2023 - 51.5 ton kebutuhan medis, pakaian, selimut, tenda, dan bahan makanan.
- Tahap 2 : 20 November 2023 - total nilai hibah senilai USD 2 juta ekuivalen dengan Rp 31,9 miliar dalam bentuk
 1. bantuan in-kind sejumlah 21,2 ton obat-obatan dan perlengkapan kesehatan lainnya
 2. bantuan tunai sebesar Rp 18,6 miliar

18.022

WNI dievakuasi dari berbagai situasi krisis (bencana alam, pandemi, konflik bersenjata, perang)

360

WNI yang berhasil dibebaskan dari hukuman mati

56

WNI yang menjadi korban pembajakan bersenjata

Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2024

Komitmen Indonesia untuk Palestina tidak bergeming, tetap kuat mendukung proses perdamaian melalui kerja-kerja diplomasi. Selain itu, Indonesia juga terus memperjuangkan kepentingan negara berkembang di dalam pergaulan internasional.

Negara juga hadir untuk memberi perlindungan yang inklusif dan paripurna bagi seluruh warga negara Indonesia di belahan dunia manapun.

Capaian 10 Tahun Pelindungan WNI

Tahun 2014-2023

224.141

Kasus berhasil diselesaikan

3.209

Kasus perdagangan manusia

>18.022

WNI menerima vaksin di luar negeri

Rp1 Trilyun

Pengembalian hak keuangan WNI di luar negeri (denda, asuransi, gaji belum dibayar, kompensasi, dll)

Bantuan Indonesia bagi Afghanistan

- Program pelatihan peningkatan kapasitas ibu dan anak serta keluarga berencana bagi Afghanistan, pada 3-10 November 2022. Diikuti oleh total peserta 38 orang tenaga kesehatan atau akademisi di bidang keluarga berencana, kesehatan reproduksi serta kesehatan ibu dan anak.
- Program beasiswa S2 Pemri tahun 2022 di UIII untuk lima orang mahasiswa. Para mahasiswa telah tiba di Indonesia sejak Oktober 2022 dan sedang menjalankan studi di UIII.
- Program beasiswa tahun 2023
 1. 5 orang di UIII
 2. 10 orang di UMY
- Pengiriman bantuan vaksin ke Afghanistan
 - Pada tanggal 7 Maret 2024, Pemerintah RI telah melaksanakan pengiriman vaksin polio bOPV yang diproduksi oleh PT. Bio Farma. Indonesia mengirimkan 10 juta dosis vaksin polio bOPV senilai Rp17.205.000.000 melalui skema dana hibah yang dikelola oleh Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI).
- Pengiriman bantuan kemanusiaan Afghanistan untuk Gempa Herat
 1. 9 non-food items berupa refuge tent, family tent/dome, light tower, hygiene kits, kitchen set, dignity kits, blankets, tarpaulin and jerry cans.
 2. Total nilai bantuan sebesar US\$ 1,067,187 (Rp 17.458.805.600).
 3. Angka tsb dapat membantu lebih dari 1200 KK (8400 jiwa).

Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2024

Dunia semakin tanpa batas. Pergaulan global harus terus digalang untuk membawa kebaikan bagi bangsa dan kawasan demi mencapai amanat konstitusi.

Testimoni Sekjen PBB Guterres “Keketuaan Indonesia di G20 berada di situasi yang sulit tapi sangat sukses. Indonesia berhasil menyelesaikan kesepakatan meski sejumlah anggota saling berselisih. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN juga sangat efektif.”

“

Keketuaan Indonesia di G20 berada di situasi yang sulit tapi sangat sukses. Indonesia berhasil menyelesaikan kesepakatan meski sejumlah anggota saling berselisih. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN juga sangat efektif.

Antonio Guterres

Sekretaris Jenderal PBB

”

Outstanding Achievements

Tahun 2014-2023



Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM periode 2024-2026



MIKTA Leaders Gathering, Bali, 9 September 2023



High-Level Meeting of the 10th World Water Forum, Bali, 18-25 Mei 2024

Keberhasilan Pencalonan Indonesia

- Selama 10 tahun terakhir, Indonesia berhasil terpilih dalam 94 pencalonan keanggotaan Organisasi Internasional strategis (77% dari total 122 pencalonan)
- Keberadaan pada Organisasi Internasional strategis meningkatkan global trust pada Indonesia, termasuk leadership Presiden Joko Widodo



Sumber Foto: Antara

Beberapa Keberhasilan Pencalonan



Anggota Tidak Tetap DK PBB
2019-2020



Anggota Dewan HAM
(2015-2017, 2020-2022, & 2024-2026)



65
Pencalonan Negara



Anggota ECOSOC
2021-2023



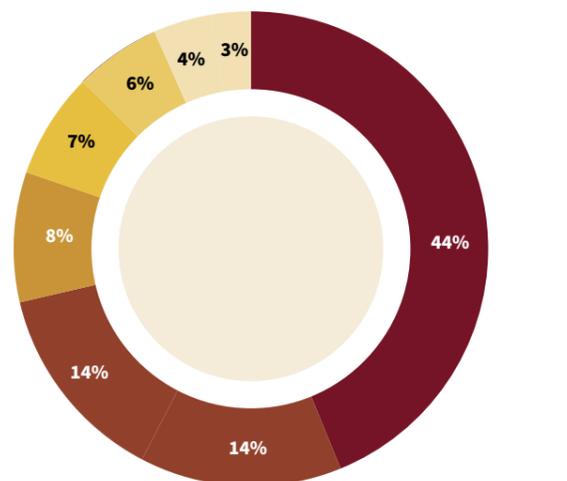
Anggota Dewan IMO
sebanyak 5 kali



29
Pencalonan Individu

Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2024

Bantuan Hibah Indonesia Berdasarkan Kawasan

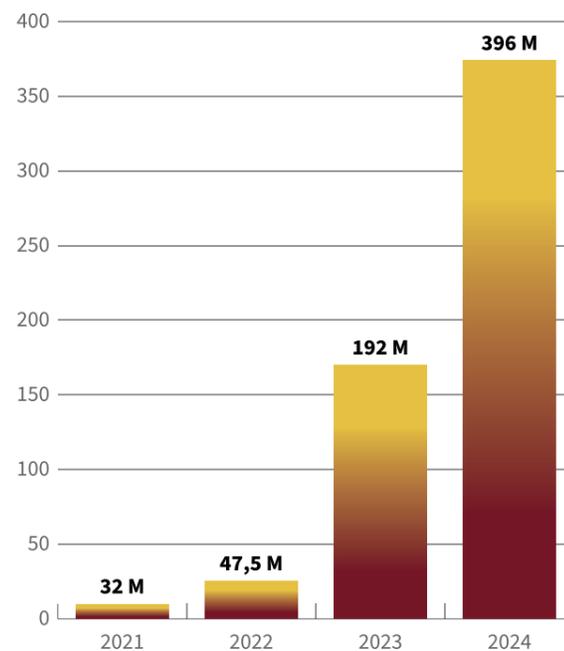


■ America-Caribbean ■ Europe
 ■ Middle East ■ Africa
 ■ International Organization ■ Multi-Beneficiary Countries
 ■ Asia ■ Pacific and the Oceania

Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2024

Pemberian Hibah ke Negara Berkembang 2021-2024

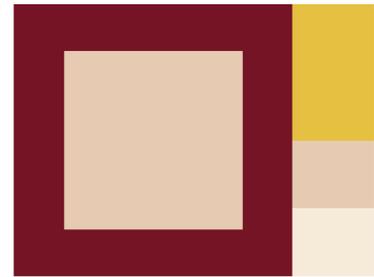
dalam satuan Miliar



Sumber Foto: Antara



Sumber Foto: BPMI Setpres

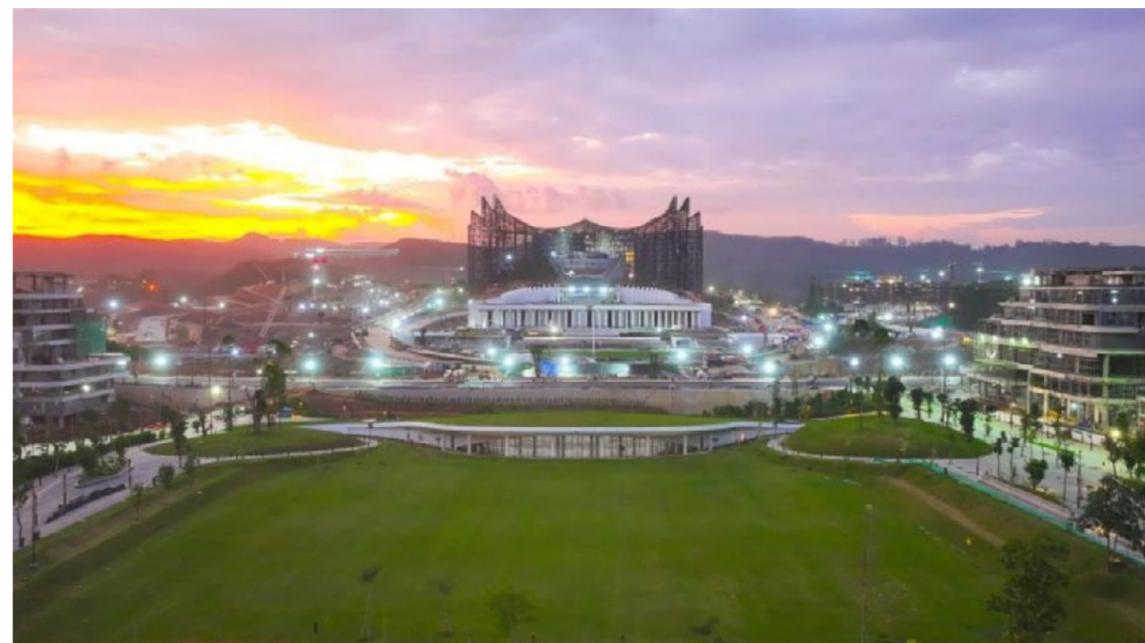


Ibukota Kita Nusantara

Siapa sangka pemindahan ibu kota negara benar-benar diwujudkan. Gagasan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta secara permanen telah dimulai tahun 1957 oleh Presiden Soekarno, berlanjut pada pemerintahan berikutnya. Baru pada tahun 2022, wujud keseriusan Indonesia membangun Ibu Kota Negara Nusantara ditandai dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2022. Secara bertahap hingga tahun 2045, pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan dilaksanakan, bukan hanya di Kawasan Inti Pemerintahan Pusat namun juga menyentuh kawasan penyangga di sekitarnya.

Gerak cepat membangun Nusantara tetap berpegang pada kelestarian lingkungan. Penggunaan energi terbarukan, transportasi publik yang ramah lingkungan, dan ruang terbuka hijau yang luas menjadi prioritas demi lahirnya kota berkelanjutan di masa depan (smart forest city).

Seluruh bangunan di Nusantara dihiasi ornamen khas Indonesia dengan desain futuristik yang memikat. Garuda Pancasila tidak lagi hanya sebatas gambar di dinding ruangan, tetapi menjadi cahaya yang menerangi seantero kota Nusantara.



Sumber Foto: Antara

Kita wajib bergembira, Indonesia kini memiliki kota pusat kemajuan baru yang asli ide karya anak bangsa. Agar kegembiraan ini terus berlanjut, pembangunan Nusantara harus diteruskan

dengan hati yang teguh oleh pemerintahan berikutnya, menjadikan setiap langkah sebagai warisan bagi generasi masa depan.

Linimasa Pembangunan Ibu Kota Nusantara



I. 2022–2024

Pemindahan tahap awal



II. 2025–2029

Membangun Ibu Kota Nusantara sebagai area inti yang tangguh



III. 2030–2034

Melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan lebih progresif



IV. 2035–2039

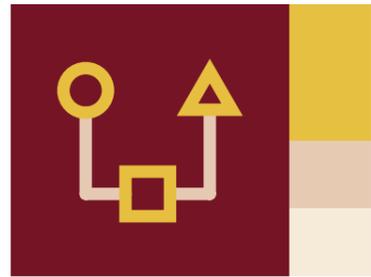
Membangun seluruh infrastruktur & ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan



V. 2040–2045

Mengokohkan reputasi sebagai “Kota Dunia untuk Semua”

Sumber: UU No. 3 Tahun 2020 & Perpres No. 63 Tahun 2022



Mitigasi Perubahan Iklim

Bumi sedang tidak baik-baik saja. Suhu global meningkat akibat pembakaran bahan bakar fosil. Menyebabkan berbagai bencana seperti kekeringan hebat, kelangkaan air, naiknya permukaan laut sampai ke penurunan keanekaragaman hayati.

Maka, dunia bersatu berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca dalam COP 21 menghasilkan Paris Agreement 2015 untuk menjaga agar penambahan suhu global tetap

di bawah 1,5° Celcius. Pemerintah Indonesia pun turut serta dengan menyusun Nationally Determined Contribution (NDC) hingga ke Enhanced NDC, yang menjadi panduan bagi seluruh stakeholders.

Pengurangan emisi di sektor FOLU, energi, limbah, IPPU dan pertanian digariskan melalui rehabilitasi lahan, pengelolaan air gambut, efisiensi energi, bahan bakar rendah emisi, pengelolaan limbah hingga ke pemanfaatan limbah ternak.

Aksi Mitigasi dalam Rangka Pencapaian Target Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

31,89%

Dibandingkan skenario BaU

43,20%

Dibandingkan skenario BaU

FOLU	Energi	Limbah	IPPU	Pertanian
<ul style="list-style-type: none"> Penurunan deforestasi Penurunan degradasi hutan Rehabilitasi lahan Pengelolaan air gambut Restorasi lahan gambut 	<ul style="list-style-type: none"> Energi terbarukan Efisiensi energi Bahan bakar rendah emisi Pemanfaatan Clean Cool Technology 	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan limbah padat & cair domestik Pengelolaan limbah industri Pemanfaatan sludge IPAL Pemanfaatan Zero Landfill 	<ul style="list-style-type: none"> Pengurangan Clinker to Cement Ratio pada industri semen Peningkatan efisiensi industri ammonia Penambahan aksi mitigasi 	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan varietas rendah emisi Sistem pengairan sawah hemat air Aplikasi pupuk organik Pemanfaatan limbah ternak
17% 25,4%	12% 15,5%	1,4% 1,5%	0,1% 0,11%	0,3% 0,13%

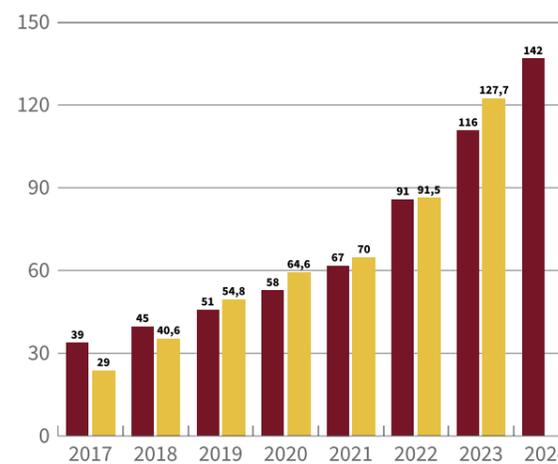
Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024

Warisan pemerintah 10 tahun terakhir dalam mitigasi perubahan iklim mencakup berbagai kebijakan dan inisiatif penting yang telah membawa perubahan positif. Sektor energi telah berhasil menurunkan emisi sebesar 127,67 juta ton CO2e di 2023 di atas target yang disepakati. Secara nasional, pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di 2020 telah menurunkan 192,5 juta ton CO2e. Luas kebakaran hutan dan lahan juga berhasil dijaga di bawah 500 ribu hektar di 2022. Secara keseluruhan, Indonesia berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak 41,61% di 2022 bila dibandingkan dengan baseline.

Keberhasilan dalam menurunkan tingkat deforestasi dan peningkatan kesadaran publik merupakan capaian yang signifikan, namun masih banyak tantangannya. Masalah implementasi, penegakan hukum, dan ketergantungan pada batubara menunjukkan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

Progras Realisasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi

Dalam satuan Juta Ton CO2e



Aksi Mitigasi	2023		Target 2030	% Capaian Target 2030
	Target	Capaian		
1. Efisiensi Energi	29,14	31,87	132,25	24,1%
2. Energi Baru dan Terbarukan	51,00	51,29	181,45	28,3%
3. Bahan Bakar Rendah Karbon	15,92	15,55	16,83	92,4%
4. Penggunaan Teknologi Pembangkit Bersih	16,54	13,33	21,53	61,9%
5. Kegiatan Lain	3,95	15,63	5,84	267,6%
Total	116,45	127,67	358,00	35,6%

■ Target ■ Realisasi

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024



Sumber Foto: Antara





Capaian 10 Tahun Pemerintahan Joko Widodo

Kantor Staf Presiden RI

